



**PENGARUH KETEPATAN ANGGARAN KECUKUPAN ANGGARAN DAN
SASARAN ANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TERHADAP KINERJA PEMBIAYAAN SEKOLAH**

(studi kasus pada SMA/SMK Negeeri dan Swasta di Kota Sukabumi)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Dimas Fathir Ramadhan

0221 13 277

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN**

BOGOR

2021

**PENGARUH KETEPATAN ANGGARAN KECUKUPAN
ANGGARAN DAN SASARAN ANGGARAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH TERHADAP KINERJA
PEMBIAYAAN SEKOLAH**
(Studi Kasus pada SMA/SMK Negeri dan Swasta di Kota Sukabumi)

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA,
CCSA, CA, CSEP, QIA)

**PENGARUH KETEPATAN ANGGARAN KECUKUPAN
ANGGARAN DAN SASARAN ANGGARAN BANTUAN
OPERASIONAL SERTA-LAH TERHADAP KINERJA
PEMBIAYAAN SEKOLAH**
(Studi Kasus pada SMA/SMK Negeri dan Swasta di Kota Sukabumi)

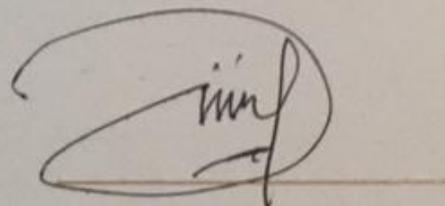
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari: Kamis, Tanggal: 22 Januari 2021

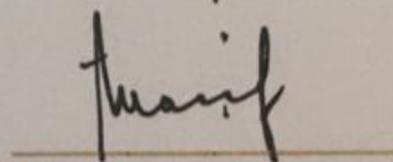
Dimas Fathir Ramadhan
022113277

Disetujui

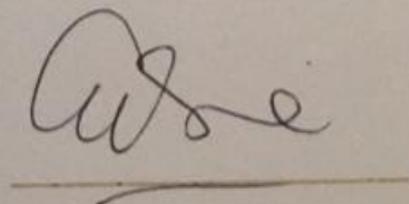
Ketua Penguji Sidang
(Drs. Ketut Sunarta, MM,Ak.)



Ketua Komisi Pembimbing
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA,
CCSA, CA, CSEP, QIA)



Anggota Komisi Pembimbing
(Dessy Herlisnawati, S.E., M.si)



ABSTRAK

Dimas Fathir Ramadhan. 022113277. Pengaruh Ketepatan Anggaran, Kecukupan Anggaran, dan Sasaran Anggaran Bantuan Operasional Sekolah terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah (Studi Kasus pada SMA/SMK Negeri dan Swasta di Kota Sukabumi Tahun 2020). Pembimbing: Dr. Arief Tri Hardianto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CSEP., QIA

Ketepatan anggaran, kecukupan anggaran, dan sasaran anggaran bantuan operasional sekolah merupakan hal penting dalam pembiayaan sekolah. Kinerja pembiayaan sekolah yang baik dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap proses pendidikan. Di Indonesia, pembiayaan sekolah erat kaitannya dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah dan madrasah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh ketepatan anggaran BOS terhadap kinerja pembiayaan sekolah negeri dan swasta tahun 2020. (2) Untuk mengetahui pengaruh kecukupan anggaran BOS terhadap kinerja pembiayaan sekolah negeri dan swasta tahun 2020. (3) Untuk mengetahui sasaran anggaran bos terhadap kinerja pembiayaan sekolah negeri dan swasta tahun 2020. (4) Untuk mengetahui gambaran ketepatan anggaran, kecukupan anggaran, serta sasaran anggaran BOS terhadap kinerja pembiayaan sekolah tahun 2020.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan peneliti yaitu sebanyak 14 sekolah menengah atas negeri dan swasta di Kota Sukabumi. Data diuji dengan menggunakan SPSS versi 21. Berdasarkan uji hipotesis dengan $df = 40$, diperoleh hasil $F_0 = 5,505 > F_{0,05}^{(40)} = 4,17$. dengan kata lain, terdapat pengaruh yang baik dari ketepatan anggaran, kecukupan anggaran, dan sasaran anggaran bantuan operasional sekolah terhadap kinerja pembiayaan sekolah. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya, ketepatan anggaran, kecukupan anggaran, dan sasaran anggaran bantuan operasional sekolah berpengaruh baik terhadap kinerja pembiayaan sekolah.

Kata kunci: ketepatan anggaran, kecukupan anggaran, sasaran anggaran, bantuan operasional sekolah, kinerja pembiayaan.

**PENGARUH KETEPATAN ANGGARAN, KECUKUPAN ANGGARAN
DAN SASARAN ANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TERHADAP KINERJA PEMBIAYAAN SEKOLAH**

**(Studi Kasus Pada Sekolah SMA/SMK Negeri
dan Swasta di Kota Sukabumi).**

SKRIPSI

Telah disetujui untuk disidangkan

Pada hari.....tanggal...../...../.....

Dimas Fathir Ramadhan

022113277

Menyetujui,

Ketua Komisi Pembimbing,

Anggota Komisi Pembimbing,

(Dr. Arief Tri Hardianto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CSEP., QIA.)

(Dessy Herlisnawati, S.E., M.si.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

(Dr. Arief Tri Hardianto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CSEP., QIA)

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penulis panjatkan puja dan puji syukur atas khadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada peenulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Ketepatan Anggaran, Kecukupan Anggaran dan Sasaran Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Kinerja Peembiayaan Sekolah (Studi Kasus pada SMA/SMK Negeri dan Swasta di Kota Sukabumi)”**.

Limpahan doa, dorongan dan motivasi membuat penulis menyadari banyak pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, penulis menghormati dan berterimakasih terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Hery Rustiandi dan Sry Erna Mulus yang selalu mendoakan anaknya agar bisa lulus, sukses dan bahagia.
2. Kedua kakak dan adik saya yang selalu memberikan dukungannya.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,CMA.,CCSA.CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PakuanBogor.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,CMA.,CCSA.CA., CSEP., QIA selaku Ketua Komisi Pembimbing yang selalu memberi arahan serta dukungan dalam pembuatan skripsi ini
6. Ibu Dessy Herlisnawati, S.E., M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing yang selalu memberi arah serta dukungan dalam pembuatan skripsi ini
7. Segenap Staff Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
8. Rizca Mutasima Dwi sebagai teman spesial yang selalu memberikan bantuan, dukungan, serta motivasi kepada saya
9. Gengkoran sebagai sahabat yang selalu mendukung saya.
10. Sahabat-sahabat di kebon randu yang selalu mendukung saya
11. Rekan-rekan angkatan 2013 Jurusan Akuntansi kelas F atas kerjasama dan bantuannya selama ini.

Penulis berharap skripsi tentang BOS yang dilakukan penulis ini dapat berguna untuk memperluas pengetahuan pembacanya. Penulis berusaha maksimal dalam membuat skripsi ini akan tetapi penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak yang terdapat kelemahan dan kekurangan karena keterbatasan waktu, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.

Bogor, Januari 2021

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS.....	10
2.1 Anggaran	10
2.2 Bantuan Operasional Sekolah	33
2.3 Kinerja Pembiayaan Sekolah	35
2.4 Pengaruh Ketepatan, Kecukupan dan Sasaran Anggaran terhadap Bantuan Operasional Sekolah terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah	42
2.5 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran	44
BAB III.....	51
OBJEK DAN METODE PENELITIAN	51
3.1 Objek Penelitian	51
3.2 Metode Penelitian	51
BAB IV.....	67
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67

4.1 Hasil Penelitian	67
4.1.1 Tinjauan Umum Subjek Penelitian	67
4.2 Analisis Hasil Data	68
4.2.1 Uji Kualitas Data	68
4.2.2 Deskripsi Variabel Ketepatan Anggaran (X_1)	73
4.2.3 Deskripsi Kecukupan Anggaran (X_2)	78
4.2.4 Deskripsi Sasaran Anggaran (X_3)	84
4.2.5 Deskripsi variable Kinerja Pembiayaan Sekolah (Y)	92
4.2.6 Transformasi Data	99
4.2.7 Uji Asumsi Klasik	99
4.2.8 Pengujian Hipotesis	101
4.3 Pembahasan	104
4.3.1 Pengaruh Ketepatan Anggaran BOS terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah	105
4.3.2 Pengaruh Kecukupan Anggaran BOS terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah	106
4.3.3 Pengaruh Sasaran Anggaran BOS terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah	107
4.3.4 Pengaruh Ketepatan Anggaran Kecukupan Anggaran dan Sasaran Anggaran BOS terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah	108
BAB V	111
SIMPULAN DAN SARAN	111
5.1 Simpulan	111
5.2 Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi SMA dan SMK Negeri/Swasta realisasi per komponen Provinsi Jawa Barat 2015	4
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	44
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	54
Tabel 3.2 Daftar Sekolah SMA/SMK Negeri/ Swasta Kota Sukabumi	59
Tabel 3.3 Skala likert	60
Tabel 4.1 Pengujian validitas variable X_1	69
Tabel 4.2 Pengujian Validitas Variable X_2	70
Tabel 4.3 Pengujian Validitas X_3	70
Tabel 4.4 Pengujian Validitas Variable Y	71
Tabel 4.5 Hasil Uji Realibilitas	72
Tabel 4.6 Perhitungan Frekuensi Jawaban Variabel X_1	73
Tabel 4.7 Interpretasi Skor	74
Tabel 4.8 Frekuensi Jawaban tentang Kesesuaian Biaya dengan Standar	75
Tabel 4.9 Frekuensi Jawaban tentang Kelancaran Pencairan Dana	76
Tabel 4.10 Perhitungan Frekuensi Jawaban Variabel X_2	78
Tabel 4.11 Interpretasi Skor	79
Tabel 4.12 Frekuensi Jawaban tentang Pencapaian Hasil yang Diinginkan....	80
Tabel 4.13 Frekuensi Jawaban tentang Kecukupan untuk Setiap Kegiatan Operasional	81
Tabel 4.14 Perhitungan Frekuensi Jawaban variable X_3	85
Tabel 4.15 Interpretasi Skor	86
Tabel 4.16 Frekuensi Jawaban tentang Penerimaan dana BOS	87
Tabel 4.17 Frekuensi Jawaban tentang Penerimaan dana BOS	88
Tabel 4.18 Frekuensi Jawaban tentang Dampak dana BOS	90
Tabel 4.19 Perhitungan Frekuensi Jawaban Variabel Y	93

Tabel 4.20 Interpretasi Skor	94
Tabel 4.21 Frekuensi Jawaban Dimensi Ekonomi	95
Tabel 4.22 Frekuensi Jawaban Dimensi Efisiensi	96
Tabel 4.23 Frekuensi Jawaban Dimensi Efektivitas.....	97
Tabel 4.24 Hasil Uji Normalitas Data.....	99
Tabel 4.25 Hasil Multikolinearitas.....	100
Tabel 4.26 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sekenario Pendanaan Pendidikan	4
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 tahun 2003, adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah permintaan dalam kehidupan anak-anak, yang mengarah pada semua kekuatan yang ada di alam agar peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup setinggi-tingginya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan diuraikan dengan jelas bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 juga secara terperinci menjelaskan mengenai komponen biaya pendidikan yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan dialokasikan dalam APBN, yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam APBD, sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada pasal 6 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 telah menyebutkan bahwa warga Negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib menempuh pendidikan selama 9 tahun sehingga program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menurut petunjuk teknis BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005 berperan sangat signifikan. Oleh karena itu, tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas salah satunya yaitu warga negara wajib menuntaskan sekolah selama 12 tahun dan dana BOS sebagai salah satu bentuk pendanaan pendidikan yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BOS SMA/SMK mengikuti pedoman yang disusun oleh pemerintah, dengan mengutamakan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) yaitu dilaksanakan secara swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif, efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional mengatakan bahwa pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Di Indonesia banyak anak justru harus putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Tingginya angka putus sekolah muncul dengan alasan karena mahalny biaya pendidikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, Kementrian Pendidikan dan kebudayaan mengembangkan rintisan program Wajib Belajar 12 Tahun, pemerintah telah menyiapkan program BOS SMA/SMK pada tahun 2015 dan disiapkan anggaran sebesar Rp.5,347 Triliun rupiah yang akan disalurkan kepada SMA/SMK Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. Dengan besarnya dana yang disalurkan oleh pemerintah seharusnya sekolah menggunakan dana tersebut dengan tepat.

Semenjak adanya dana BOS untuk SMA/SMK Negeri dan Swasta, dana tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan tiap post di sekolah mulai dari pengadaan alat tulis sekolah, pengadaan alat habis pakai, pengadaan buku pelajaran sampai dengan biaya asuransi keamanan dan keselamatan sekolah juga penyusunan dan pelaporan dana BOS. Selain itu, dari segi sarana dan prasarana yang ada di sekolah sejak adanya dana BOS juga semakin meningkat. Selain dari sarana dan prasarana, banyak hal yang bisa mengukur keberhasilan kinerja pembiayaan sekolah. Hal ini tidak akan terjadi apabila anggaran yang ada tidak dikelola dengan tepat dan sesuai sasaran.

Di Indonesia justru banyak anak yang harus putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Jumlah anak yang putus sekolah dan juga berpendidikan rendah di Indonesia terbilang cukup tinggi. Berdasarkan laporan dari departemen Pendidikan dan kebudayaan, setiap menit setidaknya ada empat anak

yang harus putus sekolah. Sementara itu menurut pengamat pendidikan, Muhammad Zuhdan, sebagaimana dilansir suaramerdeka.com (09/03/2015), tahun 2014 tercatat 1,3 juta anak usia 7-15 tahun di Indonesia terancam putus sekolah. Mahalnya biaya sekolah menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka putus sekolah ini. Tentu ini adalah sebuah keprihatinan, karena bila diingat bahwa seluruh anak di Indonesia harus menempuh pendidikan dasar minimal 12 tahun (jenjang SD, SMP, dan SMA).

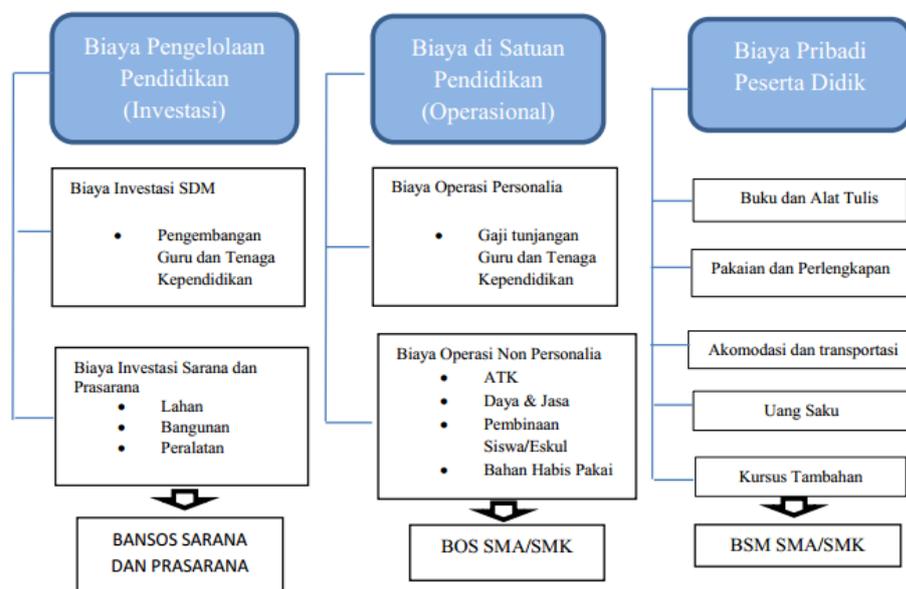
Sesuai dengan pernyataan tersebut, pada tahun 2015 Kemendikbud menyebutkan bahwa dari 100% anak-anak yang masuk SD, hanya terdapat 80% anak yang melanjutkan masa sekolahnya hingga lulus, sedangkan 20% sisanya putus sekolah. Dari 80% tersebut hanya 61% anak yang melanjutkan ke jenjang SMP atau setingkat lainnya. Kemudian setelah itu hanya 48% yang akhirnya lulus sekolah. Sementara itu, 48% yang lulus SMP hanya 21% yang bisa melanjutkan ke jenjang SMASMK. Kemudian hanya 10% yang bisa lulus SMA/SMK. Berdasarkan permasalahan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan rintisan program Wajib Belajar 12 tahun, Pemerintah telah menyiapkan program BOS SMA/SMK pada tahun 2015, telah disiapkan anggaran sebesar Rp. 5.347 triliun yang akan disalurkan kepada SMA/SMK Negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Salah satu tujuan adanya program BOS SMA ini adalah guna membantu sekolah dalam memenuhi biaya operasional non-personalia.

Sasaran Program menurut Petunjuk Teknis BOS Sekolah Menengah Atas Tahun 2015 adalah untuk SMA/SMK Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. Besaran bantuan per sekolah diperhitungkan dari jumlah siswa, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah dan satuan biaya BOS SMA. Satuan biaya nasional (unit cost) program BOS SMA sebesar Rp. 1.200.000/siswa/tahun. Sehingga total anggaran program BOS SMA tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 5.347.291.800.000
2. Untuk penyaluran periode januari-juni sebesar Rp 600.000/siswa dan periode Juli-Desember sebesar Rp. 600.000/siswa.

Skenario pendanaan pendidikan menengah merupakan upaya untuk menyediakan sejumlah dana yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah menengah. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi : (a) Biaya Investasi Sekolah (Pengelolaan Pendidikan), (b) Biaya Operasional Sekolah (Biaya di Satuan Pendidikan), dan (c) Biaya Pribadi Peserta Didik. Berikut ini Skenario pendanaan pendidikan menurut Juknis BOS Tahun 2015:

(Gambar 1.1 Skenario Pendanaan Pendidikan)



Sumber : Juknis BOS SMA/SMK tahun 2015

(Tabel 1. 1 Rekapitulasi SMA dan SMK Negeri/Swasta realisasi per komponen Provinsi Jawa Barat 2015)

No.	Komponen	Realisasi anggaran tahun 2015		Persentase	
		SMA	SMK	SMA	SMK
1	Pengadaan Buku Teks Pelajaran dan Buku Bacaan	281,081,500.00	332,216,038	6.31%	2.92%
2	Pembiayaan Pengelolaan Sekolah	778,975,150	1,189,104,399	17.48%	10.45%

3	Pengadaan Alat Habis Pakai Praktikum Pembelajaran	410,388,100	1,199,345,500	9.21%	10.54 %
4	Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Pembelajaran	458,189,900	1,713,653,000	10.28%	15.06 %
5	Langganan Daya dan Jasa	284,778,248	631,498,447	6.39%	5.55%
6	Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran	535,897,150	648,894,350	12.03%	5.70%
7	Kegiatan Pembelajaran/Intra Kurikuler dan Ekstra Kurikuler	528,921,340	655,203,950	11.87%	5.76%
8	Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/prasarana Sekolah	955,705,517	2,449,033,875	21.45%	21.52 %
9	Kegiatan Penerimaan Siswa Baru	127,879,300	274,563,250	2.87%	2.41%
10	Pembiayaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Manajemen Sekolah	47,677,500	507,237,110	1.07%	4.46%
11	Pengelolaan Data Individual SMA melalui Dapodikdasmen	24,720,700	491,640,050	0.55%	4.32%
12	Pengembangan Website Sekolah	2,000,000	29,164,500	10.22%	0.26%
13	Biaya Asuransi Keamanan dan Keselamatan Sekolah Serta Penanggulangan Bencana	0	778,705,450	0.00%	6.84%
14	Pembelian Peralatan Komputer Pembelajaran	0	135,255,200	0.00%	1.19%

15	Penyelenggaraan praktek kerja industri (prakerin) praktek kerja lapangan (PKL)	0	7,500,000	0.00%	0.07%
16	Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan	0	286,653,750	0.00%	2.52%
17	Pelaporan BOS SMA/SMK	42,871,644	50,727,781	0.44%	0.45%
	Total Penggunaan	4,455,776,134.00	11,380,396,650	100.00%	100.00%

Sumber: Kemendikbud.go.id

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sasaran per komponen dalam penggunaan BOS di SMA dan SMK baik Negeri ataupun Swasta menunjukkan dana yang masuk sudah besar dan mengeluarkan uang Negara yang tidak sedikit. Pada urutan nomor delapan menunjukkan hasil persentase yang paling tinggi dalam pengelolaan sarana dan prasana, namun dari angka-angka yang tertera di atas apakah sudah tercapai kinerja yang bagus untuk setiap sekolah yang menerima dana BOS tersebut, mulai dari pengelolaan, sarana dana prasana serta yang paling utama bagi pengajarnya yaitu, bisakah memberikan tunjangan profesi Guru yang baik dan benar. Dari data-data diatas apakah Ketepatan anggaran pada setiap post sudah benar dan sesuai dengan Juknis BOS tahun 2015 serta cukupkah anggaran yang diperuntukan untuk membeli tiap post kebutuhan mulai dari pengadaan alat tulis sekolah, pengadaan alat habis pakai, pengadaan buku pelajaran sampai dengan biaya asuransi keamanan dan keselamatan sekolah dan penyusunan dan pelaporan dana BOS.

Ketepatan anggaran merupakan gambaran tingkat efektivitas anggaran dari satu pemerintahan. Menurut Mahmudi (2010), efektivitas anggaran adalah salah satu konsep *Value For Money* (VFM) yaitu bentuk pengukuran kinerja yang spesifik dan unik pada organisasi sektor publik. Efektivitas anggaran merupakan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai.

Kecukupan anggaran menurut Naouri dan Parker (1998) dalam Yunita (2009:7) adalah tingkatan dimana seseorang merasa bahwa sumber-sumber anggarannya

cukup atau memadai untuk memenuhi syarat-syarat dalam bidang pekerjaannya, dimana para bawahan memiliki informasi yang berpengaruh tentang tingkatan dukungan anggaran yang dikehendaki untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan mereka. Keberhasilan individu maupun organisasi tergantung pada keadaan dimana bawahan dapat menerima dukungan anggaran yang memadai. Jadi untuk terselenggaranya suatu kegiatan atau pekerjaan harus mempunyai kecukupan anggaran yang baik, karena jika tidak kegiatan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah disusun sebelumnya.

Dari semua uraian diatas dapat menjadi sebuah rujukan bagaimana cara untuk mengukur kinerja sekolah. Keragaman tersebut menurut Bryson (dalam Haryoto, 2008) sebagai akibat adanya alternatif alokasi sumber daya yang berbeda, alternatif desain-desain organisasi yang berbeda, dan pilihan-pilihan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda dari setiap organisasi. Oleh karena itu menurut Haryoto (2008) dalam menilai kinerja organisasi harus dikembalikan pada tujuan atau alasan dibentuknya suatu organisasi.

Berdasarkan pada tujuan dalam menyelenggarakan kegiatan sekolah (SMA/SMK) dan standar kompetensi siswa yang diharapkan setelah mengikuti pendidikan maka penyusunan indikator kinerja sekolah dapat dilihat dari komponen-komponen sebagai berikut: a. Kurikulum, b. Peserta didik, c. Ketengaan/guru, d. Saran dan prasana, e. Organisasi dan manajemen sekolah, f. Pembiayaan, g. Peran serta masyarakat.

Kinerja sekolah di dalam Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial (Muhroji: 2012) standar nasional pendidikan diukur dengan 7 (tujuh) komponen, dari ke 7 (tujuh) komponen kinerja sekolah, penelitian ini akan menggunakan komponen Pembiayaan sebagai indikator kinerja sekolah. Serta didalam komponen pembiayaan pendidikan, indikator-indikator kinerja yang berhubungan dengan pembiayaan pendidikan : 1). Sumber dana dari pemerintah, 2). Sumber dana dari orang tua murid, 3). Sumber dana dari masyarakat, 4). Ketersediaan dana, 5). Komponen-komponen yang

dibiayai, 6). Anggaran sekolah, 7). Laporan realisasi anggaran, 8). Pemeriksaan laporan keuangan sekolah.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Ketepatan Anggaran, Kecukupan Anggaran dan Sasaran Anggaran Bantuan Operasional Sekolah terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah (Studi Kasus pada SMA/SMK Negeri dan Swasta di Kota Sukabumi Tahun 2020)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah berdasarkan fenomena yang ada, maka pada penelitian penulis ini dirumuskan masalah sebagai berikut.

1.2.1 Bagaimana pengaruh ketepatan anggaran bos terhadap kinerja pembiayaan sekolah?

1.2.2 Bagaimana pengaruh kecukupan anggaran bos terhadap kinerja pembiayaan sekolah?

1.2.3 Bagaimana pengaruh sasaran anggaran bos terhadap kinerja pembiayaan sekolah?

1.2.4 Bagaimana pengaruh ketepatan anggaran, kecukupan anggaran dan sasaran anggaran bos terhadap kinerja pembiayaan sekolah?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.1.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa mengenai ketepatan Anggaran, kecukupan Anggaran, sasaran Anggaran Bantuan Operasional Sekolah terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah.

1.1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah mengetahui hal berikut.

1.3.2.1 Mengetahui pengaruh ketetapan anggaran bos terhadap kinerja pembiayaan sekolah negeri dan swasta.

1.3.2.2 Mengetahui pengaruh kecukupan anggaran bod terhadap kinerja pembiayaan sekolah negeri dan swasta.

1.3.2.3 Mengetahui pengaruh sasaran anggaran bos terhadap kinerja pembiayaan sekolah negeri dan swasta.

1.3.2.4 Mengetahui gambaran ketepatan anggaran, kecukupan anggaran serta sasaran anggaran bantuan operasional sekolah terhadap kinerja pembiayaan sekolah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai aspek sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis yaitu untuk memberikan kontribusi pada sekolah untuk bisa memicu persaingan antara sekolah Negeri dan Swasta serta untuk memberikan pentingnya pengelolaan Anggaran BOS oleh pihak sekolah. Kemudian dapat memberikan wawasan pentingnya sasaran serta pengelolaan Anggaran BOS yang baik dan benar sesuai dengan prosedur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu untuk kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bisa memberikan gambaran sampai dimana Anggaran BOS itu bergulir sehingga anak-anak Indonesia bisa mempunyai sumber daya manusia yang baik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Anggaran

2.1.1 Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan suatu proses sejak tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencananya sendiri, implementasi dari rencana tersebut sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil rencana tersebut. Hasil dari kegiatan penganggaran (Budgeting) adalah anggaran (budget).

Menurut Bastian (2010, hlm 95) penyelenggaraan kegiatan organisasi yang menjadi kewenangan organisasi didanai dari dana atas beban anggaran pendapatan dan belanja organisasi itu sendiri. Penyusunan anggaran dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Program.
2. Berdasarkan pertanggungjawaban, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi.
3. Sebagai alat perencanaan dan pengendalian.
4. Sebagai alat motivasi kinerja bagi karyawan.

Menurut M.nafarin (2013:11) pengertian atau definisi Anggaran (budget) adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodeik anngaran yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untung jangka waktu tertentu dalam umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi, anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen.

Menurut (Asnawi et al., 2013) ketepatan anggaran, yaitu suatu hasil pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan standar dan bentuk Surat Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis. Serta Kecukupan menurut (Asnawi et al., 2013) Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Serta Sasaran menurut Juknis BOS 2015 Sasaran dalam penelitian ini merupakan untuk siapa dana BOS diberikan, tujuan dana BOS, dan dampaknya dana BOS agar tujuan dari program BOS dapat dicapai. Dengan adanya tuntutan masyarakat agar dana yang efektif dan efisien serta adanya Peraturan Menteri Keuangan NO 93 PMK.02/2011 yang menyebutkan mengenai (PBK) Penganggaran Berbasis Kinerja.

2.1.2 Manfaat dan Tujuan Anggaran

Manfaat anggaran menurut M. Narifin (2013:19) diantaranya:

1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama.
2. Dapat dipergunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai.
3. Dapat memotivasi pegawai.
4. Menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai.
5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
6. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan dan dana yang dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.

Sedangkan tujuan dari pembuatan anggaran menurut M.Narifin (2013:19) yaitu:

1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
2. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
3. Merasionalkan sumber dana investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

4. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih dan nyata terlihat.
5. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setisap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

2.1.3 Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2011:67) prinsip-prinsip anggaran sektor publik dibagi menjadi delapan yang menjelaskan bagaimana anggaran sektor publik itu bisa berlaku di masyarakat. Adapun prinsip-prinsip anggaran sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Otorisasi oleh Legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

2. Komperhensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana *non-budgetair* pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komperhensif.

3. Keutuhan Anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).

4. Nondiscretionary Appropriation

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatna secara ekonomis, efisien, dan efektif.

5. Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan.

6. Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukan cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi angagran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan overtime pengeluaran.

7. Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.

8. Diketahui publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rencana kerja Pemerintah daerah merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah. Jika kualitas anggaran pemerintah daerah rendah, maka kualitas fungsi-fungsi pemerintah cenderung lemah. Anggaran Pemerintah daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas.

Menurut Kenis dalam Nadirsyah, dkk (2012:64) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksanaan anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung-jawab untuk menyusun dan melaksanakannya.

Locke (1968) menyatakan bahwa penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif daripada tidak menetapkan tujuan spesifik yang akan mendorong pegawai untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan, tekanan dan ketidakpuasan dari pegawai.

Menurut Locke dan Latham (1984) dalam noho (2014), agar pengukuran kejelasan sasaran anggaran efektif ada 7 indikator yang diperlukan yaitu:

1. Tujuan

2. Kinerja (Biaya, produktivitas, waktu, Volume pelayanan)
3. Standar
4. Jangka waktu
5. Sasaran prioritas
6. Tingkat kesulitan
7. Koordinasi

Sasaran anggaran dalam penelitian sesuai petunjuk teknis BOS tahun 2015 merupakan untuk siapa dana BOS diberikan, tujuan dana BOS, dan dampaknya dana BOS agar tujuan dari program BOS dapat dicapai. Adapun upaya tersebut bisa dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Penerimaan dana Bos

Penerimaan dana BOS didalam petunjuk dan teknis BOS tahun 2015 didefinisikan sebagai seperangkat standar dan proses yang memberikan dasar untuk melaksanakan kegiatan program sekolah. Penerimaan dana BOS terdiri dari :

- a. Tepat waktu penerimaan dana
- b. Penerimaan sesuai atau tidak dengan yang telah direncanakan
- c. Penerimaan disaksikan oleh kepala sekolah atau yang mewakilinya

2. Tujuan dana BOS

Didalam petunjuk teknis BOS tahun 2015 banyak menjelaskan tentang kegunaan anggaran yang telah diperuntukan untuk menjalankan kegiatan. Tujuan dana BOS terdiri dari :

- a. Membantu biaya operasional non personalia sekolah
- b. Mengurangi angka putus sekolah
- c. Meningkatkan APK siswa
- d. Mewujudkan keberpihakan pemerintah bagi siswa miskin untuk mendapatkan pendidikan yang terjangkau dan bermutu
- e. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran disekolah

3. Dampak Dana BOS

Dampak dana BOS ini didalam petunjuk dan teknis BOS 2015 bagaimana realisasi di lapangan mengenai hasil dari diberlakukannya anggaran bos tersebut. Serta keberhasilannya terdiri dari:

- a. Terpenuhinya bahan-bahan habis pakai
- b. Terpenuhinya langganan daya dan jasa
- c. Terwatnya sekolah
- d. Terpenuhinya para guru GTT/PTT
- e. Menurunnya angka putus sekolah
- f. Terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah

2.1.4 Prinsip Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Proses penyusunan anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2011, hlm, 68) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yang dipersentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran, proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu:

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritaskan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban perintah kepada DPR/DPRD dan msyarakat luas.

Serta terdapat beberapa faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah:

1. Tujuan dari target yang hendak dicapai
2. Ketersediaan sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah).

3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.
4. Faktor-faktor lain yang memengaruhi anggaran, seperti : munculnya perarturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan poitik, bencana alam, dan sebagainya.

Pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo (2011, hlm. 69) pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek penganggaran aspek akuntansi, aspek pengendalian, dan aspek auditing. Aspek penganggaran mengantisipasi pendapatan danbbelanja (*revenue and ependitures*), sedangkan aspek akuntansi terkait dengan proses mencatat, mengolah, dan melaporkan segala aktivitas penerimaan dan pengeluaran (*receipts and disbursment*) atas dana pada saat anggaran dilaksanakan. Kedua aspek tersebut dianggap pentng dalam manajemen keuangan publik. Namun, di antara kedua aspek tersebut aspek penganggaran dianggap sebagai isu sentral bila dipandang dari sisi waktu. Kalau aspek akuntansi lebih bersifat "*retrospective*" (pencatatan masa lalu), maka aspek penganggaran lebih bersifat "*prospective*" atau "*anticipatory*" (perencanaan masa yang akan datang). Karena aspek penganggaran dianggap sebagai isu sentral, maka para manajer publik perlu mengetahui prinsip-prinsip pokok yang ada pada siklus anggaran.

2.1.5 Ketepatan Anggaran

Anggaran dalam organisasi sektor publik termasuk dalam lembaga pendidikan sangar penting, karena: a. Kebutuhan dan keinginan masyarakat tak terbatas dan selalu berkembang sementara sumber daya yang ada terbatas. Sehingga perlu adanya pilihan dan prioritas-prioritas, b. Anggaran dipakai untuk menunjukkan kepada publik bahwa dana publik yang digunakan oleh organisasi atau lembaga dapat dipertanggung jawabkan. Anggaran merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik, c. Anggaran merupakan pengarah dan pemotivasi dalam mencapai tujuan organisasi. Ketepatan anggaran berkaitan dengan sasaran dari setiap kegiatan agar mencapai anggaran (McPhee, 2008). Hal ini didukung dengan pendapat Mulyadi (2001:489) yang menyatakan salah satu karakteristik anggaran, menganalisis dan menjelaskan kinerja keuangan anggaran serta selisihnya. Serta

menurut (Asnawi et al., 2013) yaitu suatu hasil pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan standar dan bentuk surat Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis.

Ketepatan anggaran merupakan gambaran tingkat efektivitas anggaran dari satu pemerintahan. Menurut Mahmudi (2010), efektivitas anggaran adalah salah satu konsep *Value For Money* (VFM) yaitu bentuk pengukuran kinerja yang spesifik dan unik pada organisasi sektor publik. Efektivitas anggaran merupakan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wiswly*). Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2011), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal ini mengartikan bahwa jika suatu tujuan atau sasaran anggaran telah tercapai sesuai anggaran yang direncanakan sebelumnya, maka terdapat ketepatan anggaran antara rencana anggaran dengan realisasinya dalam hal ketepatan waktu, guna, dan sasaran sehingga dapat mencerminkan kinerja keuangan yang baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Nordiawan dan Hertianti (2010) bahwa efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan suatu kegiatan / kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output.

Menurut Zainudin (2013) dalam Noho (2014) untuk mengukur efektivitas anggaran ada empat indikator yang diperlukan yaitu memenuhi tujuan, memenuhi target, dan efektif.

Pendapat di atas dijelaskan bahwa ukuran efektivitas dan ketepatan anggaran harus dilihat dari perbandingan anatara masukan dan keluaran, tingkat kepuasan yang diperoleh, penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta adanya rasa saling

memiliki yang tinggi. Makmur (2001:7-9) mengungkapkan indikator efektivitas dan ketepatan anggaran khususnya di sektor *corporate* dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut :

1. Ketepatan Waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Ketepatan Perhitungan Biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian efektivitas.

3. Ketepatan dalam Pengukuran

Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

4. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik di antara yang baik atau yang terjujur di antara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur di antara yang baik dan jujur.

5. Ketepatan Berpikir

Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

6. Ketepatan dalam Melakukan Perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak

dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

7. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktifitas organisasi untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

8. Ketepatan Sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktifitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Berdasarkan uraian Indikator efektivitas oleh Makmor di atas intinya dapat dilihat bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran-ukuran ketepatan efektivitas dimana suatu target atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sedangkan Richard M. Steers dalam Tangkilisan (2005) mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus Integrasi menyangkut proses sosialisasi

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan dilapangan.

Adanya tuntutan masyarakat agar dana yang efektif dan efisien serta adanya Peraturan Menteri Keuangan No.93 PMK.02/2011 yang menyebutkan mengenai (PBK) penganggaran Berbasis Kinerja. Aparatur pemerintahan daerah dalam hal ini memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan dengan tepat sehingga penyusunan anggaran pada periode selanjutnya dapat tercapai dengan baik pada intansi pemerintah.

Ketepatan Anggaran menurut (Asnawi : 2013) yaitu suatu hasil pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan standar dan bentuk Surat Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan ketentian juklak dan juknis. Ketepatan yang dimaksud adalah berdasarkan ketepatan waktu penyaluran anggaran atau dana dan kelancaran pencairan dana dengan dimensi sebagai berikut:

1. Kesesuaian Biaya dengan Standar

Kesesuaian biaya dengan standar ini menurut (Asnawi : 2013) merupakan alat sebagai tolak ukur untuk menentukan ketepatan anggaran, terutama anggaran bantuan operasional sekolah yang sangat menunjang untuk kegiatan sekolah, oleh karena itu kesesuaian biaya dengan standar bisa di ukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- a. Efektif dalam melakukan belanja sesuai dengan petunjuk dan teknis
- b. Ketersediaan dana untuk kebutuhan sekolah
- c. Serta yang bertugas untuk pengambilan dana

2. Kelancaran dalam Pencairan Dana

Kelancaran dalam pencairan dana menurut (Asnawi ; 2013) memberikan pengaruh yang sangat berarti untuk kelancaran kegiatan operasional non personalia sekolah serta untuk terselenggaranya pendidikan dengan baik. Kelancaran dalam pencairan dana terdiri dari:

- a. Waktu penyaluran dana

- b. Mekanisme penyaluran dana
- c. Keterlibatan orang penting selain pemegang keputusan

Berdasarkan beberapa indikator ketepatan anggaran yang di ungkapkan menurut beberapa ahli diatas, bahwa teori yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah indikator ketepatan Asnawi. Alasan peneliti lakukan yaitu fokus ketepatan anggaran untuk bantuan operasional sekolah.

Menurut Mardiasmo (2011, hlm 62) pentingnya anggaran sektor publik terdapat beberapa aspek kehidupan yang tidak tersentuh oleh anggaran sektor publik, baik skala tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin dan layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang di ambil oleh bpemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang arakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut. Anggaran merupakan blue print keberadaan sebuah negara dana merupakan arahan di masa yang akan datang.

Anggaran dan kebijakan fiskal pemerintah, kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk memengaruhi keadaan ekonomi melalu sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran sektor publik harus dapat memenuhi kriteria berikut:

- a. Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- b. Menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah.

Aliran uang yang terkait dengan aktivitas pemerintah akan memengaruhi harga lapangan kerja, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan beban pajak yang harus dibayar atas pelayanan yang diberikan pemerintah. Keputusan

anggaran yang dibuat pemerintah daerah dan provinsi seharusnya merefleksikan prioritas pemerintah daerah atau provinsi dengan baik.

Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*) dan *trade offs*.
- c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

2.1.6 Kecukupan Anggaran

(Indarto & Ayu, 2011) kecukupan anggaran adalah didefinisikan sebagai tingkat persepsi individual bahwa sumber-sumber yang dianggarkan mencukupi untuk melaksanakan aktivitas aktivitas yang diperlukan. Beberapa penelitian di bidang akuntansi mengemukakan bahwa manajer bawah mempunyai informasi yang lebih akurat daripada atasan mengenai kondisi-kondisi lokal pusat pertanggung jawaban yang dimilikinya. Melalui partisipasi anggaran akan memberikan informasi yang dimiliki oleh bawahan akan dapat dipergunakan dalam penyusunan anggaran tersebut. Dengan demikian adanya partisipasi anggaran maka informasi yang lebih banyak sehingga dapat tingkat kecukupan anggaran dapat tercapai. Serta kecukupan anggaran menurut Naori dan Parker (1998) ialah tingkatan dimana seseorang merasa bahwa sumber-sumber anggarannya cukup atau memadai untuk memenuhi syarat-syarat dalam bidang pekerjaannya, dimana para bawahan memiliki informasi yang berpengaruh tentang tingkatan dukungan anggaran yang dikehendaki untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan mereka. Serta menurut (Asnawi et al., 2013) menjelaskan kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektifitas memuaskan

kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Jadi untuk terselenggaranya suatu kegiatan atau pekerjaan harus mempunyai kecukupan anggaran yang baik, karena jika tidak kegiatan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Upaya tersebut dapat dilihat dari dimensi sebagai berikut:

1. Pencapaian Hasil yang Diinginkan

Menurut (Asnawi: 2013) pencapaian hasil yang diinginkan berkaitan erat dengan bagaimana pencapaian suatu organisasi untuk mencapai visi dan misi serai rencana kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun prinsip-prinsip yang mendukung penilaian pencapaian hasil yang diinginkan adalah sebagai berikut.

- a. Terealisasinya antara rencana dengan realisasi dilapangan
- b. Seberapa jauh hasil yang ada dengan perencanaan sebelumnya.

2. Kecukupan untuk setiap kegiatan operasional

Kecukupan untuk setiap kegiatan operasional menurut (Asnawi: 2013) bagaimana anggaran yang telah diterima bisa mencapai setiap kegiatan yang akan dilakukan terutama mengacu cukup atau tidaknya anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah. Adapun prinsip-prinsip untuk kecukupan untuk setiap kegiatan operasional adalah sebagai berikut.

- a. Pengembangan untuk perpustakaan
- b. Pengadaan untuk penerimaan siswa baru
- c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
- d. Terlaksana kegaitan ulangan dan ujian sekolah
- e. Penyediaan untuk langganan daya dan jasa
- f. Perawatan
- g. Pembayaran guru tetap dan tidak tetap
- h. Pengembangan profesi guru
- i. Pembiayaan pengelolaan BOS

Fungsi anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2011, hlm. 63) anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut.

1. Anggaran sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, bebrapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan sebagai berikut.

- a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
- c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Anggaran sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*)

Sebagai alat pengendalian anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelajaran yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan publik. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengednalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran *misappropriation*. Dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.

Sebagai alat pengendalian manajerial, anggran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu anggaran digunakan untuk memberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi dan pemborosan.

Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:

- a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan.
- b. Menghitung selisih anggaran
- c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas suatu varians.
- d. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

3. Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran sebagai Alat Politik (*Political Tool*)

Anggaran digunakan untuk memenuhi prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian berorganisasi. Dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik, oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.

5. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*coordination and Communication Tool*)

Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam prose penyusunan anggaran, anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi anatar unit kerja dalam

lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6. Anggaran sebagai Alat Penelitian Kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7. Anggaran sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

8. Anggaran sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Sphere*)

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisasi akan mencoba memengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka, kelompok lain dari masyarakat yang ada. Pengangguran, tuna wisma dan kelompok lain dari masyarakat yang tidak terorganisasi akan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan masa, melakukan boikot, vandalisme, dan sebagainya.

2.1.7 Sasaran Anggaran

Menurut Kohler dalam Zein (2008) efektivitas sebagai kualitas, kuantitas, hasil jasa, penggunaan waktu atau pencapaian kinerja lainnya yang sebanding dengan standar yang ditentukan semula. Efektivitas pelaksanaan anggaran yaitu tercapainya sasaran anggaran baik secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan petunjuk dan teknis BOS Sasaran dalam penelitian ini meruapaj untuk siapa dana BOS diberikan, tujuan dana BOS, dan dampaknya dana BOS agara tujuan dari program BOS dapat dicapai. Menurut Mardiasmo (2011, hlm. 66) anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Anggaran Operasional (*operation / Recurrent budget*)

Anggaran Operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalag “Belanja Rutin” . Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagia pemerintah. Disebut “rutin” karena sifatnya pengeluaran tersebut berulang-ulang ada di setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain Belanja Adminstrasi Umum dan Belanja Operasi Pemeliharaan.

b. Anggaran Modal/ Investasi (*Capital/ Investment budget*)

Anggaran modal menunjukan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gudang, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja modal/investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan.

2.1.7.1 Pendanaan Pendidikan

Serta didalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 mengenai Pendanaan Pendidikan sebagai dasar pelaksanaan ketentuan Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat (a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; b peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; c. Pihak lain yang dimaksud dalam huruf a dana huruf b yang mempunyai perhatian dan

peranan dalam bidang pendidikan) Biaya pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasi.

Biaya investasi yaitu sebagai berikut.

- a. Biaya investasi lahan pendidikan untuk satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar dan bukan program wajib belajar, baik formal maupun nonformal yang menjadi tanggungjawab pemerintah / pemerintah daerah dianggarkan dalam anggaran pemerintah / pemerintah daerah
- b. Biaya investasi selain lahan pendidikan untuk satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar dan bukan wajib belajar, baik formal maupun non formal yang menjadi tanggung jawab pemerintah / pemerintah daerah dianggarkan dalam anggaran pemerintah / pemerintah daerah.
- c. Biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah / Pemerintah daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah / Pemerintah daerah masyarakat.

Biaya operasi yaitu sebagai berikut.

- a. Biaya personalia menurut sistem pendidikan nasional dan pasal ayat 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 baik formal maupun nonformal, bagi PNS di sektor pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah / pemerintah daerah meliputi:
 1. Gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan dianggarkan dalam anggaran pemerintah / pemerintah daerah;
 2. Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan dianggarkan dalam anggaran pemerintah / pemerintah daerah;
 3. Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan dianggarkan dalam anggaran pemerintah / pemerintah daerah;
 4. Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dianggarkan dalam anggaran pemerintah / pemerintah daerah dan dosen dianggarkan dalam anggaran pemerintah;

5. Tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dianggarkan dalam anggaran pemerintah / pemerintah daerah dan dosen dianggarkan dalam anggaran pemerintah;
 6. Tunjangan profesi bagi guru dan dosen dianggarkan dalam anggaran pemerintah;
 7. Tunjangan khusus bagi guru dan dosen dianggarkan dalam anggaran pemerintah;
 8. Konsekuensi anggaran dari masalah tambahan bagi guru PNS sektor pendidikan dianggarkan dalam anggaran pemerintah / pemerintah daerah dan guru non PNS maupun dosen dianggarkan dalam anggaran pemerintah; dan
 9. Tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar dianggarkan dalam anggaran pemerintah.
- b. Biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang menjadi tanggungjawab pemerintah / pemerintah daerah dianggarkan dalam anggaran pemerintah / pemerintah daerah.
 - c. Biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar yang menjadi tanggungjawab pemerintah / pemerintah daerah dianggarkan dalam anggaran pemerintah / pemerintah daerah dan masyarakat.

Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya, berupa:

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya
- b. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi
- c. Pemberian bantuan biaya pendidikan siswa mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didiknya.

Beasiswa adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pemberian beasiswa mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.

Biaya Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan biaya penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, meliputi:

1. Biaya investasi yang terdiri atas:
 - a. Biaya investasi lahan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah / pemerintah daerah dianggarkan dalam anggran pemerintah / pemerintah daerah.
 - b. Biaya investasi selain lahan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah / pemerintah daerah dianggarkan dalam anggaran pemerintah / pemerintah daerah.
2. Biaya operasi, yang terdiri atas :
 - a. Biaya personalia baik formal maupun nonformal bagi PNS di sektor pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah / pemerintah daerah dialokasi dalam anggaran pemerintah, meliputi :
 - 1) gaji pokok;
 - 2) tunjangan yang melekat pada gaji;
 - 3) tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
 - 4) tunjangan fungsional bagi pejabat bagi pejabat fungsional.
 - b. Tanggung jawab pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia bukan PNS di sektor pendidikan dianggarkan dalam anggaran pemerintah/ pemerintah daerah meliputi:
 - 1) subsidi tunjangan fungsional bagi dosen tetepa yang ditugaskan oleh pemerintah / pemerintah daerah atau penyelenggara / satua pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - 2) subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap madrasah dan pendidikan keagamaan formal yang ditugaskan oleh pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;

- 3) tunjangan profesi bagi guru yang ditugaskan oleh pemerintah atau dosen yang ditugaskan oleh pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - 4) tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan di daerah khusus oleh pemerintah;
 - 5) tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan di daerah khusus oleh penyelenggara/ satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang memperoleh persetujuan dari pemerintah;
 - 6) tunjangan kehormatan bagi dosen tetap yang memiliki jabatan profesor atau guru besar yang ditugaskan oleh pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - 7) honorarium bagi guru honor yang digunakan oleh pemerintah / pemerintah daerah; dan
 - 8) honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah / pemerintah daerah atau masyarakat atas inisiatif pemerintah.
- c. Biaya nonpersonalia yang menjadi tanggungjawab pemerintah / pemerintah daerah dianggarkan dalam anggaran pemerintah / pemerintah daerah.

Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah / pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah / pemerintah daerah masyarakat.

- a. Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

- b. Pemerintah dapat memberikan daerah dapat memberikan hibah kepada daerah atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Pemangku kepentingan pendidikan, an pihak asing dapat membantu pendanaan biaya satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah / pemerintah daerah.
- e. Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan oleh masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
- f. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan
- g. Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah / pemerintah daerah dikelola sesuai sistem anggaran pemerintah / pemerintah daerah.
- h. Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan ;ada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja negara/ daerah.
- i. Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan dalam rangka pengawasan penerimaan dana penggunaan dana pendidikan pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Dana pendidikan pemerintah dan pemerintah daerah serta satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Dana pendidikan dari pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah (tidak termasuk dalam dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan

dan dana alokasi khusus bidang pendidikan) dan dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah antara Menteri Keuangan atau kuasanya dengan kepala daerah, biaya penyaluran dananya tidak boleh dibebankan kepada penerima hibah dan penerima hibah wajib melaporkan jumlah dana yang diterima dan penggunaannya kepada Menteri Pendidikan dan Menteri Keuangan.

2.2 Bantuan Operasional Sekolah

Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai salah satu bentuk pendanaan pendidikan yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU), pada tahun 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMA/SMK di seluruh Indonesia. Program BOS SMA/SMK yang merupakan program utama ini diharapkan mampu membantu memenuhi biaya operasional sekolah dan memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu terutama bagi siswa miskin.

BOS SMA/SMK merupakan program Pemerintah berupa pemberian dana langsung ke sekolah dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (unit cost) bantuan. Dana BOS SMA/SMK digunakan untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah non personalia. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana BOS SMA/SMK tersebut, sekolah diwajibkan untuk membebaskan dan/atau membantu siswa miskin. Jumlah siswa yang dibebaskan atau mendapat keringanan biaya pendidikan menjadi kebijakan sekolah dengan mempertimbangkan faktor jumlah siswa miskin yang ada, dana yang diterima dan besarnya biaya sekolah. Serta ada beberapa hal yang harus dipahami didalam JUKNIS BOS diantaranya:

2.2.1 Pengertian BOS

BOS yang dimaksud dalam program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan secara konsep adalah mencakup

komponen untuk biaya operasional non personil hasil studi badan penelitian dan pengembangan departemen pendidikan nasional (BALITBANG DEPDIKNAS). Yang menjadi prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah, bukan biaya kesejahteraan guru dan bukan untuk biaya investasi.

2.2.2 Sasaran dan Program dan Besar Bantuan

Sasaran program adalah untuk SMA Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. Besar bantuan per sekolah diperhitungkan dari jumlah siswa, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah dan satuan biaya BOS SMA. Satuan biaya nasional (unit cost) program BOS SMA sebesar Rp. 1.200.000/siswa/tahun. Sehingga total anggaran program BOS SMA tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 5.347.291.800.000.
2. Untuk penyaluran periode Januari-Juni sebesar Rp. 600.000/siswa dan periode Juli-Desember sebesar Rp.600.000/siswa.

Peranan Program BOS SMA/SMK dalam pelaksanaan rintisan program wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu program utama (*icon*) pemerintah yang bertujuan mendukung keberhasilan rintisan Program Wajib Belajar 12 tahun. Seluruh *stakeholder* pendidikan wajib memperhatikan pentingnya program BOS SMA yaitu :

1. Memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi siswa miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu.
2. Merupakan sarana penting untuk meningkatkan akses layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu.
3. Mempersempit gap angka partisipasi sekolah anatar kelompok penghasilan kaya dan miskin, dan antar wilayah (kota-desa)
4. Menyediakan sumber dana bagi sekolah untuk mencegah siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran sekolah dan biaya ekstrakurikuler sekolah.

5. Mendorong dan memberikan motivasi kepada pemerintah daerah serta masyarakat yang mampu untuk memberikan subsidi kepada siswa miskin (subsidi silang).

2.2.3 Kriteria Siswa Miskin yang Dibebaskan dan/atau Diberikan Keringanan dari Tagihan Biaya Sekolah

Kriteria siswa miskin sangat bervariasi dan melekat pada kondisi demografi. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan ukuran miskin berdasarkan kondisi daerah dan kondisi sekolah masing-masing. Sebagai contoh siswa miskin di sekolah “A” belum tentu miskin di sekolah “B: dan sebaliknya. Oleh karena itu, kriteria siswa miskin yang dibebaskan dan/atau diberikan keringanan melalui BOS SMA menjadi kewenangan (diskresi) sekolah sesuai dengan konsep MBS. Namun demikian sekolah tetap harus memperhatikan kriteria siswa miskin dan faktor lainnya yaitu :

1. Biaya pendidikan persiswa.
2. Jumlah siswa miskin.
3. Dana BOS yang diterima sekolah.
4. Siswa yang termasuk dalam Program Indonesia Pintar (PIP), siswa yang berasal dari rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Program Keluarga Harapan (PKH)
5. Siswa yang terancam putus sekolah karena tidak mampu membayar tagihan biaya sekolah.
6. Siswa yang tingkat kemampuan ekonomi orangtuanya paling rendah di sekolah.

2.3 Kinerja Pembiayaan Sekolah

Menurut mahsun (2014, hlm. 53) Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang

telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dan kinerja kelompok (Mangkunegara, 2005, hlm 15).

Whittaker (dalam Tangkilisan, 2007:171) mengemukakan pengukuran kinerja organisasi merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Stout (dalam Tangkilisan, 2007:174) mengemukakan pengukuran kinerja organisasi merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaiannya misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa atau pun suatu proses.

Mengukur kinerja organisasi sangat penting, pengukuran kinerja organisasi menurut Bastian (2013:330) akan mendorong pencapaian tujuan organisasi dan akan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus-menerus. Oleh karena itu sistem pengukuran kinerja harus dibangun sedemikian rupa sehingga informasi mengenai kinerja dapat diperoleh sebanyak dan seakurat mungkin.

Parameter pengukuran kinerja sekolah sebagai suatu konstruk, kinerja bersifat multidimensional akan bias jika diukur dengan menggunakan pengukuran atau standar tunggal. Oleh karena itu, menurut Murphy et.al., (1996), dan Wiklund, (1999), umumnya kinerja diukur berdasarkan perbandingan dengan berbagai kriteria atau standar. Lumkin dan Dess, (1996), dan Wiklund, (1999), menegaskan “karena kinerja suatu organisasi memiliki banyak dimensi, maka semakin banyak ukuran yang digunakan, yaitu berdasarkan perbandingan berbagai kriteria dan standar, akan semakin memberikan informasi kinerja yang semakin baik. Brandon dan Drtina (1998), mengingatkan kesalahan penetapan pengukuran kinerja akan mengakibatkan informasi kinerja yang salah. Oleh karena langkah pertama dalam merancang sistem pengukuran kinerja adalah memilih ukuran-ukuran yang tepat sesuai dengan seluruh aspek dan kepentingan organisasi.

Terlepas dari besar, jenis, sektor, atau spesialisasinya, menurut Bastian (2013:331-332) kinerja organisasi diukur melalui aspek finansial, kepuasan pelanggan, operasi bisnis internal, kepuasan pegawai, kepuasan komunitas dan stakeholder, serta waktu. Dwiyanto dkk. (2002:48-49) mengemukakan ukuran tingkat kinerja organisasi meliputi produktivitas, orientasi kualitas layanan kepada

pelanggan, responsivitas dan akuntabilitas. Lusthaus, et. al. (1999:46) mengemukakan kinerja organisasi dapat diukur melalui dimensi efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kesinambungan keuangan. Perry (dalam Syarifudin dan Tangkilisan, 2002:14) mengemukakan dimensi pengukuran untuk mengukur kinerja organisasi adalah workload/demand, economy, efficiency, effectiveness, dan equity. Nurkolis (2001:111) mengemukakan kinerja sekolah dapat diukur dari efektifitas, kualitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan, dan moral kerja.

Ammons (dalam Muhammad, 2008:15) menjelaskan kinerja organisasi dapat diukur melalui kriteria workload, efficiency, effectiveness, dan productivity. Workload menunjukkan jumlah beban kerja yang diselesaikan. Efficiency menunjukkan perbandingan antara input dan output. Effectiveness menunjukkan perbandingan antara output dan outcome yaitu tingkat ketercapaian hasil akhir setelah output diperoleh. Productivity menunjukkan jumlah hasil yang dicapai pada kurun waktu tertentu.

Fenwick (dalam Muhammad, 2008:15) menggunakan tiga dimensi dalam mengukur kinerja organisasi, yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Dimensi ekonomi adalah perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan kualitas sumber daya yang diperoleh sebagai input dalam proses manajemen. Dikatakan semakin ekonomis, jika biaya yang dikeluarkan kecil sedangkan kualitas sumber daya yang diperoleh semakin baik, dan sebaliknya. Dimensi efisiensi adalah perbandingan antara sumber daya yang digunakan dan output. Artinya berapa output yang dihasilkan dalam proses bila dibandingkan dengan input yang masuk. Semakin besar output yang dihasilkan dan semakin kecil input yang masuk akan semakin efisien. Dimensi efektivitas adalah sejauh mana output yang dihasilkan dapat memenuhi sasaran dan tujuan manajemen. Jadi besarnya output tidak selalu menunjukkan besarnya outcome karena berhubungan dengan sasaran dan tujuan.

Uraian di atas menunjukkan begitu banyak dimensi yang dapat dijadikan rujukan untuk mengukur kinerja organisasi. Kergaman tersebut menurut Bryson (dalam Haryoto, 2008) sebagai akibat adanya alternatif alokasi sumber daya yang berbeda, alternatif desain-desain organisasi yang berbeda dari setiap organisasi. Oleh karena itu menurut Haryoto (2008) dalam menilai kinerja

organisasi harus dikembalikan pada tujuan atau alasan dibentuknya suatu organisasi.

Sekolah adalah organisasi yang mempunyai tugas utama memberikan layanan pendidikan bermutu kepada masyarakat. Terkait dengan layanan pendidikan tersebut, pemerintah telah menetapkan Standar Pendidikan Nasional sebagai dasar rujukan untuk mengukur kinerja sekolah. Oleh karena itu dengan memerhatikan berbagai pendapat para ahli tentang dimensi pengukuran kinerja organisasi, maka pengukuran kinerja sekolah dalam penelitian ini merujuk kepada Standar Pendidikan Nasional, sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2005. Terdapat delapan Standar Pendidikan Nasional yang dapat dijadikan rujukan untuk mengukur kinerja sekolah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Delapan Standar Nasional Pendidikan tersebut dapat dijadikan dimensi untuk mengukur mutu kinerja sekolah yaitu, Kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.

Dari definisi yang disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah merupakan salah satu faktor yang sangat *urgent*. Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil sebuah pemahaman bahwa pengelolaan pembiayaan bukan hanya menyangkut dengan bagaimana pengelolaan pembiayaan yang ada tetapi termasuk juga bagaimana upaya kepala sekolah untuk memperoleh pembiayaan pendidikan.

Dari komponen-komponen penyusunan kinerja sekolah menurut (Muhroji,2012) yang telah dijelaskan di atas ada salah satu poin untuk menentukan faktor-faktor kinerja pembiayaan sekolah:

1. Sumber dana dari pemerintah
2. Sumber dana dari orang tua murid
3. Sumber dana dari masyarakat
4. Ketersediaan dana
5. Komponen-komponen yang dibiayai

6. Anggaran sekolah
7. Laporan realisasi anggaran
8. Pemeriksaan laporan keuangan sekolah.

Pengelolaan pembiayaan pendidikan yang belum mengikuti petunjuk BOS, karena didalam bos menjelaskan untuk mengukur berhasilnya program bos dilihat dari *Value For Money* ekonomi, efisien dan efektivitas, sehingga jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik membuat gagalnya pengelolaan pembiayaan terlebih dengan tidak memfungsikan pengawas oleh pemerintah untuk ikut andil memberikan kontribusi terhadap pembiayaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan pada sekolah SMA/SMK belum maksimal. Uraian yang disampaikan diatas tentang penggunaan pembiayaan pendidikan teknik pengelolaan pengawasan yang belum sempurna dan kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan merupakan masalah yang terjadi.

Dari kedua penjelasan diatas antara kinerja sekolah dengan pembiayaan sekolah bisa ditarik kesimpulan bahwa kinerja pembiayaan sekolah merupakan alat ukur yang bisa diukur melalui kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, saran dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan, serta Value For Money.

Definisi value for money berdasarkan Audit Commission dalam Final Report yang disampaikan oleh ITAD, dalam jurnal berjudul *Measuring the Impact and Value For Money of Governance & Conflict Programmes* (Chris Barnett, 69 et al:2010) adalah:

“VFM is about obtaining the maximum benefit over time with the resources available. It is about achieving the right local balance between economy, efficiency and effectiveness, or, spending less, spending well and spending wisely to achieve local priorities...VFM is high when there is an optimum balance between all three elements, when costs are relatively low, productivity is high and successful outcomes have been achieved.”

Konsep value for money merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program, kegiatan, dan organisasi. Konsep value for money (VFM) adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga sering kali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik.

Menurut Mardiasmo (2011:131), pengukuran kinerja dengan penilaian 3E (Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas) dijelaskan sebagai berikut: Indikator *Value For Money* dibagi menjadi dua bagian, yaitu indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi), dan indikator kualitas pelayanan (efektifitas)

1. Ekonomi

Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit input. Ekonomi berarti sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah atau harga yang mendekati harga pasar. Menurut Mardiasmo (2011. Hlm. 131) ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*).

Adapun penjabarannya sebagai berikut :

- a. Menggunakan harga terendah dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran.
- b. Menggunakan biaya terendah dalam pengadaan barang.
- c. Mengeluarkan biaya sesuai kebutuhan dan tidak melebihi anggaran,
- d. Melaksanakan pengadaan barang atau jasa dengan kualitas terbaik.
- e. Melakukan program berturut-turut dengan biaya di tahun ke-2 lebih kecil dari tahun sebelumnya.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga bahasan *value for money*. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{input}}$$

Organisasi sektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung di atas satu. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Mardiasmo (2011, hlm. 134) menjelaskan bahwa efisiensi dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Efisiensi alokasi, yang merupakan alokasi yang terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal.
- b. Efisiensi teknis (manajerial), merupakan yang terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu.

Adapun yang menjadi indikator untuk pencapaian efisien adalah sebagai berikut:

- a. Memilih strategi yang memerlukan biaya terendah untuk mencapai tujuan pemerintah daerah
 - b. Pengurangan aktivitas yang tidak menambah nilai bagi kesejahteraan sekolah
 - c. Penghilangan aktivitas dan fungsi yang tidak menambah nilai bagi kesejahteraan sekolah dan justru membebani anggaran. (Mardiasmo, 2011, hlm. 191)
3. Efektivitas

Mardiasmo (2011, hlm. 134) menjelaskan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat ialah bahwa efektivitas tidak menyatakan seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar dari apa yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Outcome}}{\text{output}}$$

2.4 Pengaruh Ketepatan, Kecukupan dan Sasaran Anggaran terhadap Bantuan Operasional Sekolah terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah

2.4.1 Pengaruh Ketepatan Anggaran BOS terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah.

Seperti dikemukakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam suatu periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial. Anggaran sekolah menunjukkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan bagaimana cara memperoleh dana untuk mendanai kegiatan tersebut. Anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan sekolah dan penilaian kinerja pembiayaan sekolah didasarkan pada pelaksanaan value of money dan efektivitas anggaran. Ketepatan anggaran berkaitan dengan sasaran dari setiap kegiatan agar tercapai anggaran (McPhee, 2008). Hal ini didukung dengan pendapat Mulyadi (2001:489) yang menyatakan salah satu karakteristik anggaran, menganalisis dan menjelaskan kinerja keuangan anggaran serta selisihnya.

Dalam penelitian Febriana (2010) yang berfokus pada pelaporan yang masuk ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota oleh sekolah-sekolah yang mendapatkan dana BOS kabupaten Solok. Hasil analisis yang dilakukan terhadap ketepatan anggaran, menyatakan bahwa ketepatan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja pembiayaan sekolah. Dengan ketepatan anggaran yang baik maka kinerja sekolah akan berjalan sesuai dengan tujuan visi dan misi sekolah.

2.4.2 Pengaruh Kecukupan Anggaran terhadap Kinerja pembiayaan Sekolah.

Kecukupan anggaran dalam suatu organisasi menjadi hal yang paling utama dalam menjalankan aktivitasnya (Indarto & Ayu, 2011). Kecukupan anggaran didefinisikan sebagai tingkat persepsi individual bahwa sumber-sumber yang dianggarkan mencukupi untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang diperlukan. Dari komponen-komponen penyusunan kinerja pembiayaan sekolah menurut (Muhroji, 2012) yang telah dijelaskan diatas bahwa kecukupan anggaran akan mempengaruhi terhadap kinerja organisasi publik baik pendidikan maupun kesehatan.

Dalam literatur manajemen beberapa studi telah mengemukakan masalah bagaimana kecukupan anggaran bisa memudahkan atau mengganggu kinerja manajerial (Peters dan O'connor, 1980; Blumberg dan Pringle, 1982) seperti dikutip Nouri dan Parker (1998). Nouri dan Parker (1998) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa kecukupan anggaran dihubungkan dengan prestasi kerja mempunyai hubungan positif. Karyawan dengan dukungan anggaran yang memadai, rata-rata akan menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dari pada karyawan yang tidak memiliki dukungan anggaran yang memadai. Dimana dengan kecukupan anggaran maka karyawan akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, dengan demikian kinerja akan meningkat.

2.4.3 Pengaruh Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah.

Menurut Kohler (2008) mendefinisikan efektivitas sebagai kualitas, kuantitas, hasil jasa, penggunaan waktu atau pencapaian kinerja lainnya yang sebanding dengan standar yang ditentukan semula. Efektivitas pelaksanaan anggaran yaitu tercapainya sasaran anggaran baik secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses penyusunan anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2011, hlm. 68) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN / APBD) yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Seperti dikemukakan Mardiasmo (2011, hlm. 68) bahwa sasaran anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam suatu periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sasaran anggaran sudah jelas akan mempengaruhi kinerja karena anggaran merupakan alat untuk melaksanakan pekerjaan. Anggaran sekolah berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan sekolah dimasa depan. Sasaran Anggaran sekolah menunjukkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan bagaimana cara memperoleh dana untuk mendanai kegiatan tersebut.

Dalam penelitian Desak Putu Intan & Ni Kadek Sinarwati (2014) yang berjudul pengaruh akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Deki Putra (2013) yang menunjukkan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD kota Padang.

Kenis (1984) dalam Syafrial (2009) menemukan bahwa pelaksana anggaran memberikan reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran. Reaksi tersebut adalah peningkatan kepuasan kerja, penurunan ketegangan kerja, peningkatan sikap karyawan terhadap anggaran, kinerja anggaran dan efisiensi biaya pada pelaksana anggaran secara signifikan, jika sasaran anggaran dinyatakan secara jelas.

2.5 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.5.1 Penelitian Terdahulu.

Selain teori-teori yang telah dijelaskan diatas, penulis juga menggunakan penelitian terdahulu sebagai dasar untuk melakukan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terkait dengan Ketepatan Anggaran, Kecukupan Anggaran, Sasaran Anggaran BOS terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah, yang dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1.

(Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu)

No	Judul penelitian	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
1	Pengaruh Ketepatan Anggaran, Kecukupan Anggaran dan Sasaran Anggaran Bantuan Operasional Sekolah terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah di Kota Tasikmalaya	Fahmi Mohamad Rizki (2017)	Ketepatan Anggaran dan Sasaran Anggaran BOS berpengaruh positif terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah,	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, terletak pada tempat dan waktu, subyek penelitiannya, yaitu di SMA

			sedangkan Kecukupan Anggaran BOS tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah.	dan SMK Negeri/Swasta di Kota Sukabumi.
2	Pengaruh ketepatan dana, kecukupan dana dan sasaran dana bantuan operasional sekolah terhadap peningkatan prestasi belajar siswa di kabupaten jember.	Risca Kurniasari, Agus sugiono, Andiana, Taufik Kurrohman (2015)	Ketepatan dana tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar murid. Hasil uji regresi menunjukkan variabel ketepatan dan tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar murid sasaran dana berpengaruh terhadap prestasi belajar murid.	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, terletak pada tempat dan waktu, subyek penelitiannya, yaitu di SMA dan SMK Negeri/Swasta di Kota Sukabumi.
3	Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri di Tanjung Pinang Timur.	Pebriyani (2014)	Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah khususnya di sekolah tingkat Sekolah Dasar	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan berbeda variabel X dan Y nya tetapi sama meneliti tentang anggaran BOS dan studi kasusnya juga

				berbeda, yaitu di SMA dan SMK Negeri/Swasta di Kota Sukabumi
--	--	--	--	--

2.5.2 Kerangka Pemikiran

Ketepatan Anggaran, Kecukupan Anggaran serta Sasaran Anggaran Bantuan Operasional Sekolah merupakan hal yang harus diperhatikan untuk berlangsungnya pendidikan yang sesuai dengan tujuan dari pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan diuraikan dengan jelas bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, sedangkan pada ayat (2) dijelaskan bahwa masyarakat yang dimaksud adalah meliputi (a) penyelenggara ataupun satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, (b) peserta didik, orangtua atau wali peserta didik dan (c) pihak-pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan, pengertian pada pasal 2 ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari pada Bab XIII pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, yang intinya adalah bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Selanjutnya dijelaskan mengenai komponen biaya pendidikan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 secara terperinci mengenai definisi dan komponen biaya pendidikan yang merupakan tanggung jawab pemerintah dialokasikan dalam APBN, yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam APBD, sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.

Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai salah satu bentuk pendanaan pendidikan yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU), pada tahun 2015, pada tahun 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMA/SMK di seluruh Indonesia. Program BOS

SMA/SMK yang merupakan program utama diharapkan mampu membantu memenuhi biaya operasional sekolah dan memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu terutama bagi siswa miskin.

BOS SMA/SMK merupakan program Pemerintah berupa pemberian dana langsung ke sekolah dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (unit cost) bantuan. Dana BOS SMA/SMK digunakan untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah non personalia. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana BOS SMA/SMK tersebut, sekolah diwajibkan untuk membebaskan dan/atau membantu siswa miskin. Jumlah siswa yang dibebaskan atau mendapat keringanan biaya pendidikan menjadi kebijakan sekolah dengan mempertimbangkan faktor jumlah siswa miskin yang ada, dana yang diterima dan besarnya biaya sekolah.

Anggaran dalam organisasi sektor publik termasuk dalam lembaga pendidikan sangat penting, karena: a. Kebutuhan dan keinginan masyarakat tak terbatas dan selalu berkembang sementara sumber daya yang ada terbatas, sehingga perlu adanya pilihan dan prioritas-prioritas, b. anggaran dipakai untuk menunjukkan kepada publik bahwa publik yang digunakan oleh organisasi atau lembaga dapat dipertanggung jawabkan. Anggaran merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik, c. anggaran merupakan pengarah dan pemotivasi dalam mencapai tujuan organisasi. Ketepatan anggaran berkaitan dengan sasaran dari setiap kegiatan agar tepat anggaran (McPhee, 2008). Serta pendapat menurut (Asnawi et al., 2013) yaitu suatu hasil pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan standar dan bentuk Surat Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis.

Kecukupan anggaran menurut Naori dan Parker (1998) adalah tingkatan dimana seseorang merasa bahwa sumber-sumber anggarannya cukup atau memadai untuk memenuhi syarat-syarat dalam bidang pekerjaannya, dimana para bawahan memiliki informasi yang berpengaruh tentang tingkatan dukungan anggaran yang dikehendaki untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan mereka.

Serta menurut (Asnawi et al., 2013) Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Jadi untuk terselenggaranya suatu kegiatan atau pekerjaan harus mempunyai kecukupan anggaran yang baik, karena jika tidak kegiatan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Serta Menurut Kohler (2008) mendefinisikan efektifitas sebagai kualitas, kuantitas, hasil jasa, penggunaan waktu atau pencapaian kinerja lainnya yang sebanding dengan standar yang ditentukan semula. Efektivitas pelaksanaan anggaran yaitu tercapainya sasaran anggaran baik secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Serta menurut Juknis Bos Sasaran dalam penelitian ini merupakan untuk siapa dana BOS diberikan, tujuan dana BOS, dan dampaknya dana BOS agar tujuan dari program BOS dapat dicapai.

Menurut Dedi dan Ayuningtyas (2010, hlm 84) indikator kinerja merupakan komponen terpenting dalam penganggaran berbeda kinerja, indikator ini berperan penting dalam menilai cara sebuah organisasi menjalankan program-program yang telah dianggarkan sebelumnya. Indikator kinerja dapat didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*ouput*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).

Pengukuran kinerja menurut Dedi dan Ayuningtyas (2010, hlm. 158) merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan ouput dan outcome terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambilan keputusan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan

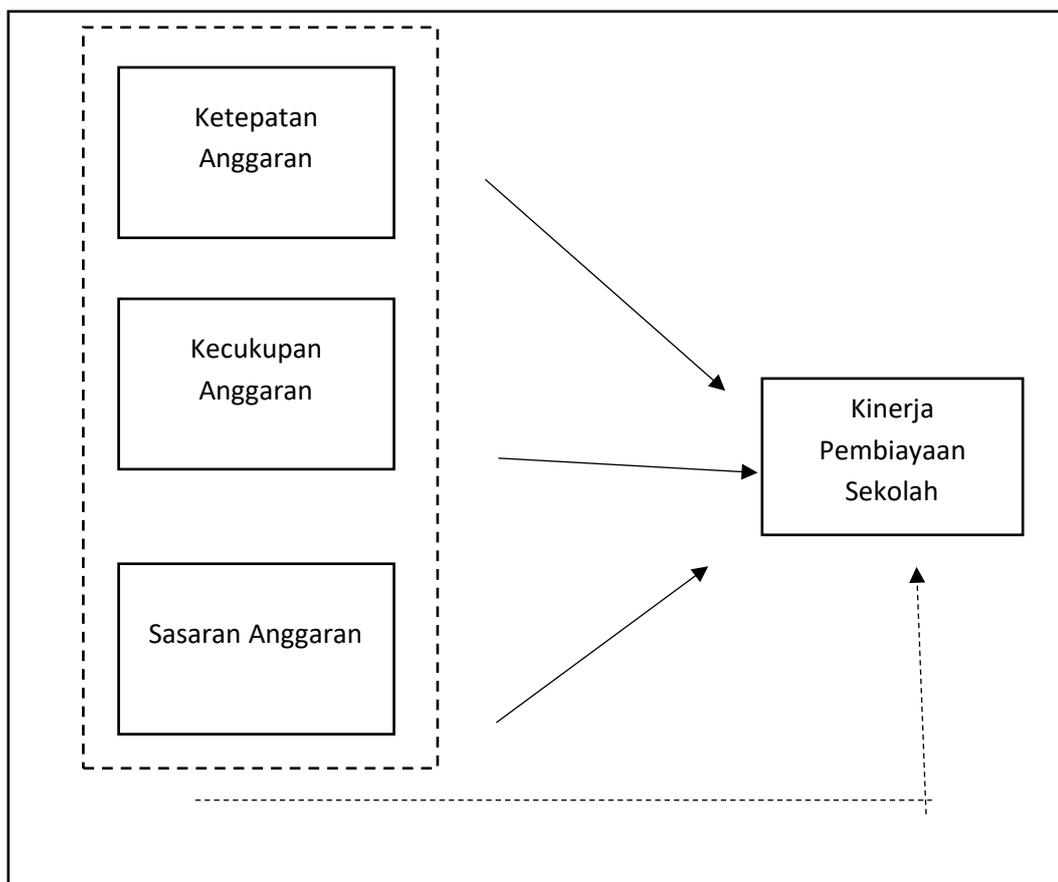
berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Berdasarkan tujuan penyelenggaraan sekolah (SMU) dan standar kompetensi siswa yang diharapkan setelah mengikuti pendidikan maka penyusunan indikator kinerja sekolah dapat dilihat dari komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Kurikulum, b. peserta didik, c. Ketenagaan/guru, d. Sarana dan prasarana, e. organisasi dan manajemen sekolah, f. pembiayaan, g. Peran serta masyarakat.

Dari komponen-komponen penyusunan kinerja sekolah menurut (Muhroji,2012) yang telah dijelaskan diatas ada salah satu point untuk menentukan pembiayaan sekolah, indikator kinerja yang berhubungan dengan pembiayaan sekolah diantaranya : 1) Sumber dana dari pemerintah, 2) Sumber dana dari orang tua murid. 3) Sumber dana dari masyarakat. 4) ketersediaan dana, 5) komponen-komponen yang dibiayai, 6) anggaran sekolah, 7) Laporan Realisasi Anggaran, 8) pemeriksaan laporan keuangan sekolah.

Secara garis besar, kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

- ▶ : Pengaruh Parsial
-----▶ : Pengaruh Simultan

(Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran)

2.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan pengaruh Ketepatan Anggaran BOS, Kecukupan Anggaran BOS, serta Sasaran Anggaran BOS terhadap kinerja Pembiayaan Sekolah, maka hipotesis penulis ajukan untuk penelitian ini adalah :

1. Ketepatan Anggaran BOS berpengaruh positif terhadap Kinerja Pembayaran Sekolah.
2. Kecukupan Anggaran BOS berpengaruh positif terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah.
3. Sasaran Anggaran BOS berpengaruh positif terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah.
4. Ketepatan Anggaran, Kecukupan Anggaran dan Sasaran Anggaran Bantuan Operasional Sekolah berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Ketepatan, Kecukupan Anggaran serta Sasaran Anggaran Bantuan Operasional Sekolah. Penelitian ini dilakukan pada SMA/SMK Negeri/Swasta di Kota Sukabumi. Dengan menggunakan objek tersebut, peneliti ingin mengetahui analisis Ketepatan Anggaran, Kecukupan Anggaran serta Sasaran Anggaran Bantuan Operasional Sekolah terhadap Kinerja Pembiayaan sekolah di SMA/SMK Negeri / Swasta di Kota Sukabumi.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Menurut Husein Umar (2013:30) desain penelitian merupakan “semua proses yang di perlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”. Rasional berarti kegiatan dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, empiris berarti cara-cara tersebut dapat diamati oleh indera manusia, dan sistematis berarti proses yang digunakan menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Setelah mengidentifikasi variable, maka langkah selanjutnya adalah mendesain penelitian sehingga data yang diperlukan dapat dikumpulkan dan dianalisis hingga tercapai tujuan penelitian.

Menurut Sekaran (2014) studi deskriptif adalah studi yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Studi deskriptif memiliki fungsi untuk: (1) memahami karakteristik sebuah kelompok dalam situasi tertentu; (2) memikirkan secara sistematis mengenai berbagai aspek dalam situasi tertentu; (3) memberikan gagasan untuk penyelidikan dan penelitian lebih lanjut; (4) membuat keputusan yang sederhana.

Selanjutnya Idrus (2009, hlm. 29) menjelaskan metode penelitian kuantitatif adalah metode yang meyakini bahwa hukum – hukum tersebut dapat

ditemukan dari data empiris dan menggunakan sampel yang dapat digunakan untuk melakukan generalisasi secara umum, selain itu metode kuantitatif dimaksudkan untuk melihat fenomena yang ada kemudian dibandingkan dengan teori yang dimiliki menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data berupa angka untuk dioperasionalkan kemudian.

Berdasarkan beberapa konsep diatas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif melalui pendekatan kuantitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menguji hasil keilmuan yang telah ada menguji setiap variabel yang diselidiki melalui pengumpulan data, pengolahan data dan penganalisisan data.

3.2.2 Definisi dan Operasionalisasi variabel

Operasional variable dapat memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat diukur dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

Sesuai dengan penelitian “Pengaruh Ketepatan Anggaran, Kecukupan Anggaran dan Sasaran Anggaran Bantuan Operasional Sekolah terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah” penulis melakukan pengujian dengan menggunakan dan variabel penelitian sebagai berikut:

1. Variabel Independen (Variabel Bebas)
 - a. Ketepatan Anggaran BOS

Ketepatan Anggaran menurut (Asnawi : 2013) yaitu suatu hasil pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan standar dan bentuk Surat Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis. Ketepatan yang dimaksud adalah berdasarkan ketepatan waktu penyaluran anggaran atau dana dan kelancaran pencairan dana. Dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Kesesuaian Biaya dengan Standar
- 2) Kelancaran pencairan dana.

b. Kecukupan Anggaran BOS

Kecukupan menurut (Asnawi : 2013) Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhana, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan anantara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Upaya tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

- 1) Pencapaian hasil yang diinginkan
- 2) Kecukupan untuk setiap kegiatan operasional

c. Sasaran Anggaran BOS

Sasaran dalam penelitian ini merupakan untuk siapa dana BOS diberikan, tujuan dana BOS, dan dampaknya dana BOS agar tujuan dari program BOS dapat dicapai. Adapun upaya tersebut bisa dilihat dari indikator sebagai berikut:

- 1) Penerimaan dana BOS
- 2) Tujuan dana BOS
- 3) Dampak dana BOS

2. Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel ouput, kriteria, konsekuen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah mengenai Kinerja Pembiayaan Sekolah (Y) dimana penulis akan meneliti sudah seberapa tercapainya tujuan organisasi sektor publik dilihat dari kinerja Pembiayaan di Kota Sukabumi. Adapun operasionalisasi variabel adalah sebagai berikut.

(Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel)

Jenis variabel	Definisi Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	No Kuesioner
Ketepatan Anggaran (X1)	Ketepatan anggaran menurut (asnawi : 2013) yaitu suatu hasil pelaksanaan Bantuan Operasioan Sekolah (BOS) yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan standar dan bentuk Surat Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis. Ketepatan yang dimaksud adalah berdasarkan ketepatan waktu penyaluran anggaran atau dana dan kelancaran pencairan dana	1. Kesesuaian biaya dengan standar	1. efektif dalam melakukan belanja sesuai dengan petunjuk dan teknis	Ordinal	1
			2.Ketersediaan dana BOS untuk kebutuhan sekolah		2
			3. yang bertugas mengambil dana BOS		3
		2.kelancaran Pencairan Dana	1. Waktu penyaluran dana BOS		4
			2.Mekanisme penyaluran		5
			3.Keterlibatan Guru dan Karyawan serta komite Sekolah		6

Kecukupan Anggaran (X2)	Kecukupan menurut (Asnawi : 2013) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.	1.Pencapaian hasil yang diinginkan	1. Terealisasinya antara rencana dengan realisasi di lapangan.	Ordinal	7
			2.Seberapa jauh hasil yang ada dengan perencanaan sebelumnya		8
		2.Kecukupan untuk setiap kegiatan operasional	1. Pengembangan untuk Perpustakaan		9
			2.Pengadaan untuk penerimaan siswa baru		10
			3.Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler		11
			4.Terlaksananya kegiatan ulangan dan ujian sekolah		12
			5. Penyediaan bahan-bahan habis pakai		13
			6. Penyediaan untuk langgana daya dan jasa		14
			7. Perawatan untuk sekolah		15

			8. Pembayaran guru GTT/PTT		16
			9. Pendanaan untuk pengembangan profesi guru		17
			10. Pendanaan untuk pembiayaan pengelolaan BOS		18
Sasaran Anggaran (X3)	Sasaran dalam penelitian ini meruapana untuk siapa dana BOS diberikan, tujuan dana BOS, dan dampaknya dana BOS agar tujuan dari program BOS dapat dicapai (Juknis BOS 2015)	1.penerimaan dana BOS	1.Tepat waktu penerimaan dana	Ordinal	19
			2.Penerimaan sesuai atau tidak dengan yang telah direncanakan		20
			3. Penerimaan disaksikan oleh kepala sekolah atau komite sekola		21
		2.Tujuan Dana BOS	1.Membantu biaya operasional nin personalia		22
			2.Mengurangi angka putus sekolah		23
			3.meningkatkan APK siswa		24
			4.Mewujudkan Keberpihakan peerintah bagi siswa		

			miskin serta membantu tagihan biaya bagi siswa miskin		25
			5. Memberikan Kesempatan setara bagi siswa miskin untuk mendapatkan pendidikan yang terjangkau dan bermutu		26
			6.Meningkatkan kualitas prose pembelajaran di sekolah		27
		3.Dampak dana BOS	1. Terpenuhiya bahan-bahan habis pakai		28
			2.Terpenuhiya langganan daya dan jasa		29
			3.Terawatnya sekolah		30
			4.Terpenuhiya para guru GTT/PTT		31
			5.menurunya angka putus sekolah		32
			6. Terpenuhiya sarana dan prasarana sekolah		33

Kinerja Pembiayaan Sekolah (Y)	Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP No. 8 Tahun 2006)	<i>Value For Money</i>	ekonomi	1.Menggunakan harga terendah dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran	34
				2.Menggunakan biaya terendah dalam pengadaan barang	35
				3. mengeluarkan biaya sesuai kebutuhan dan tidak melebihi anggaran	36
				4.melaksanakan pengadaan barang atau jasa dengan kualitas terbaik	37
				5.melaksanakan program berturut-turut dengan biaya di tahun ke-2 lebih kecil dari tahun sebelumnya	38

3.2.3 Populasi dan Sample Penelitian

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, hlm.174). sedangkan menurut Ali (2014, hlm. 90) “sampel adalah bagian yang mewakili populasi yang diambil dengan menggunakan teknik- teknik tertentu”. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling atau penyampelan tak berpeluang dengan pendekatan sampling purposive. Penyampelan tak berpeluang adalah teknik yang tidak melaksanakan perandoman, sehingga peluang setiap subjek dalam populasi untuk terpilih sebagai sampel tidak diketahui (Ali, 2014, hlm. 119). Sedangkan penyampelan purposif adalah teknik penggunaan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian itu. Sampel dalam penelitian ini adalah sekolah yang memiliki jumlah murid yang cukup baik, karena ada di beberapa sekolah yang memiliki murid sedikit contohnya saja di sekolah swasta, serta memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang baik dan dilihat dari indeks prestasi sekolah. Berikut

adalah daftar sekolah SMA/SMK Negeri dan Swasta di Kota Sukabumi pada tahun 2020

(Tabel 3.2 Daftar Sekolah SMA/SMK Negeri/ Swasta Kota Sukabumi)

No	Nama Sekolah	Status
1.	SMA ADVENT	SWASTA
2.	SMA HAYATAN THAYYIBAH	SWASTA
3.	SMA ISLAM NURUL KAROMAH	SWASTA
4.	SMK KRISTEN BPK PENABUR	SWASTA
5.	SMA MARDI YUANA	SWASTA
6.	SMA MUHAMMADIYAH	SWASTA
7.	SMA PASUNDAN	SWASTA
8.	SMA PELITA YNH	SWASTA
9.	SMA PGRI 1	SWASTA
10.	SMA PGRI 2	SWASTA
11.	SMA TAMANSISWA	SWASTA
12.	SMA YAYASAN AHMAD DJUWAENI	SWASTA
13.	SMAN 1 SUKABUMI	NEGERI
14.	SMAN 2 SUKABUMI	NEGERI
15.	SMAN 3 SUKABUMI	NEGERI
16.	SMAN 4 SUKABUMI	NEGERI
17.	SMAN 5 SUKABUMI	NEGERI
18.	SMK KOMPUTER ABDI BANGSA	SWASTA
19.	SMKN 4 SUKABUMI	NEGERI
20.	SMK KARTIKA III-2	SWASTA
21.	SMK KRISTEN BPK PENABUR	SWASTA
22.	SMK MUHAMMADIYAH 1	SWASTA
23.	SMKN 1 SUKABUMI	NEGERI
24.	SMK PASUNDAN 1	SWASTA
25.	SMK PASUNDAN 2	SWASTA
26.	SMK PENGUJI	SWASTA
27.	SMK PGRI 1	SWASTA
28.	SMK PGRI 2	SWASTA
29.	SMK PLUS BINA TEKNIK	SWASTA
30.	SMK PLUS PADJAJARAN	SWASTA
31.	SMK SILIWANGI	SWASTA
32.	SMK TAMANSISWA	SWASTA
33.	SMK TERPADU IBAADURRAHMAN	SWASTA
34.	SMK ULUL ALBAB	SWASTA
35.	SMK YASPI SYAMSUL ULUM	SWASTA
36.	SMKN 2 SUKABUMI	NEGERI
37.	SMKN 3 SUKABUMI	NEGERI

Sumber : umm.ac.id

3.2.4 Teknis Pengumpulan data serta Pengukuran Variabel

Menurut Indriantoro (2011), pengumpulan data adalah proses untuk memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data dapat memengaruhi berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Kesalahan dalam penggunaan teknik ini akan berpengaruh terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data yang digunakan dalam ini dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sujaweni,2015.hlm 98). Kuesioner termasuk teknik pengumpulan data yang efisien jika peneliti terlebih dahulu mengetahui pasti variable yang diukur dan mengetahui harapan dari responden. Dalam melakukan pengukuran atas jawaban dari kuesioner-kuesioner tersebut yang dilakukan kepada responden, skala yang digunakan adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Adapun alternatif jawaban dalam skala likert diberi skor sebagai berikut.

(Tabel 3.3 Skala likert)

Alternative Jawaban	Skor
(100%) tercapai/ sesuai/ terpenuhi/ selalu dilaksanakan/ tepat waktu/ selalu dilibatkan/ tidak ada penyimpangan/ tercukupi/ selalu terawat/ selalu terbayar/ dialokasikan/ mengurangi/ meningkat/ membantu/ memberikan/ menurun/ selalu dilakukan/ seluruh pemilih/ mengacu/ menghasilkan/ berupaya.	5
(95%) telah tercapai/ sesuai/ terpenuhi/ sering dilaksanakan/ sering disaksikan/ lebih dari 1 minggu/ sering dilibatkan/ sedikit ada penyimpangan/ telah tercukupi/ tercukupi/ sering terawat/ sering terbayar/ sering tercukupi/ >2 hari dari jadwal yang telah ditetapkan/ telah dialokasikan/ telah mengurangi/ meningkatkan/ membantu/ memberikan/ telah meningkatkan/ sering terawat/ sebagian besar memilih/ telah mengacu/ telah menghasilkan/ telah berupaya.	4
(>70%-90%) telah sesuai/ kadang-kadang disaksikan/ lebih dari 2 minggu dari jadwal/ telah sesuai/ kadang-kadang dilibatkan/ telah tercapai/ kadang-kadang ada	3

penyimpangan/ terlah tercukupi/ tercukupi/ kadang-kadang terbayar/ kadang-kadang terawat/ kadang-kadang terbayar/ kadang-kadang tercukupi/ telah mengurangi/ meningkatkan/ sebagian dilakukan/ dilaksanakan/ sebagian memilih/ telah mengacu/ telah berupaya.	
(>50%-70%) telah sesuai/ telah terpenuhi/ jarang disaksikan/ lebih dari 3 minggu dari jadwal/ jarang dilibatkan/ telah tercapai/ banyak penyimpangan/ telah tercukupi/ jarang terawat/ jarang terbayar/ jarang tercukupi/ >6 hari dari jadwal yang ditetapkan/ telah mengalokasikan/ telah mengurangi/ meningkatkan/ membantu/ memberikan/ telah meningkatkan/ telah terpenuhi/ jarang terawat/ telah menurun/ sebagian kecil dilakukan/ sebagian kecil dialihkan/ telah mengacu/ telah berupaya.	2
(<50%) telah sesuai/ telah terpenuhi/ tidak pernah disaksikan/ lebih dari 4 minggu dari jadwal/ tidak pernah dilibatkan/ telah tercapai/ menyimpang sekali/ telah tercukupi/ tidak terbayar/ tidak tercukupi/ membantu/ tidak terawat/ telah menurun/ tidak sama sekali/ telah mengacu/ telah menghasilkan/ telah berupaya.	1

Penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan cara mendatangi dan membagi kuesioner langsung kepada para responden. Setiap paket kuesioner berisi pertanyaan yang berhubungan dengan Ketepatan Anggaran BOS, Kecukupan Anggaran BOS serta Sasaran Anggaran Bos terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari dan menelaah literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dalam menunjang data primer yang telah didapat dari penelitian lapangan.

3.2.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisi data merupakan proses penyerahan data kedalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diintrupsikan. Data yang akan dianalisis merupakan data hasil pendekatan survey penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian dilakukan analisa untuk menarik kesimpulan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung kepada objek penelitian melalui mekanisme kuesioner.

Kuesioner yang disebarkan bersifat tertutup dan memuat daftar pertanyaan yang terkelompok sesuai dengan dimensi dari variabelnya masing-masing.

3.2.5.1 Uji Kualitas Data

Penelitian ini terdiri dari empat variabel yaitu Ketepatan, Kecukupan, Sasaran serta Kinerja Pembiayaan Sekolah. Suatu Penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang bias jika datanya kurang *reliable* dan kurang *valid*. Kualitas data penelitian ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data.

1. Uji Validitas

Menurut Indriantoro (2011, hlm 181) validitas data ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan valid, jika pertanyaan maupun pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Adapun untuk mempermudah perhitungan pengujian validitasnya, penulis menggunakan bantuan software SPSS (statistical Product and Service Solution). Uji validitas dilakukan dengan rumus korelasi Product Moment yang rumusnya seperti berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum x)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

n = Banyak pasangan rank

$\sum X$ = Jumlah skor item

$\sum Y$ = Jumlah skor total (seluruh item)

Dengan kriteria pengujian jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 0,05, maka alat ukur tersebut valid, begitu pula sebaliknya $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka alat ukur tersebut tidak valid.

2. Uji Realibilitas

Jika alat ukur dinyatakan valid, maka berikutnya alat ukur tersebut harus diuji realibilitasnya. Menurut Indriantoro (2011, hlm, 180) konsep reabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep tersebut yaitu konsistensi. Uji realibilitas berguna untuk menetapkan apakah dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama. Menurut Suharsimi Arikunto (2010, 221) realibilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen tersebut sudah baik. Untuk menguji reabilitas tersebut, penulis menggunakan rumus menggunakan rumus Alpha Cronbach. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan:

r_{11} = reabilitas instrument

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varians butir

σ_t^2 = varians total

Menurut Sekaran (2006) menyatakan bahwa secara umum keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,70 dapat diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik. Adapun untuk mempermudah perhitungan reabilitas, penulis menggunakan bantuan software SPSS (*statistical Product and Service Solution*).

3.2.5.2 Method Succesive of Interval (MSI)

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang berskala ordinal (menggunakan skala likert) sehingga data tidak langsung dapat dianalisis dengan statistik parametrik seperti regresi. Maka diperlukan transformasi data dari ordinal menjadi interval untuk memenuhi sebagian syarat analisis parametrik. Oleh karena itu data ordinal tersebut harus ditingkatkan (ditransformasikan) terlebih dahulu dengan *Metode Succesive Interval* (MSI). (Riduwan dan Kuncoro, 2008) dalam (Fahmi Mohamad, 2017)

Langkah-langkah dalam metode *successive interval* adalah :

1. Perhatikan setiap butir jawaban responden dari angket yang disebarkan;
2. Pada setiap butir ditentukan berapa orang yang mendapat skor 1,2,3,4 dan 5,6 yang disebut sebagai frekuensi;
3. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut proporsi;
4. Tentukan nilai proporsi kumulatif dengan jalan menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan perkolom skor;
5. Gunakan tabel Distribusi Normal, hitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh;
6. Tentukan nilai tinggi sensitasi untuk setiap nilai Z yang diperoleh (dengan menggunakan Tabel Densitas);
7. Hitung SV (*Scale Value*) atau nilai skala dengan rumus :

$$SV = \frac{\text{Density of Lower Limit} - \text{Density at Upper Limit}}{\text{Area Under Upper Limit} - \text{Area Under Lower Limit}}$$

8. Tentukan nilai transformasi dengan rumus :

$$Y = NS + [1 + |N_{smin}|]$$

Data yang telah melalui proses MSI, selanjutnya diolah dalam pengujian statistik lanjutan untuk mendapatkan pembuktian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

3.2.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menurut Suharyadi dan Purwanto (2011, hlm 82) adalah suatu prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang digunakan untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karena tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Langkah-langkah pengujian hipotesis dalam penelitian ini ditempuh dengan prosedur berikut:

3.2.6.1 Uji Asumsi Klasik

Model regresi dapat disebut sebagai model yang baik jika memenuhi kriteria yang baik. Kriteria yang baik tersebut disebut BLUE (*Best Liner Unbiased Estimator*). BLUE dapat dicapai bila memenuhi uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik model regresi yang akan diuji adalah :

1) Uji Normalitas Data

Data sebelum diolah menggunakan inferensi parametrik maupun non parametrik harus diuji normalitas. Statistik parametrik tidak dapat digunakan jika data tidak normal. Data tidak normal pengujiannya dapat menggunakan statistik non parametrik (Sujarweni 2015; hlm. 85). Dalam penelitian ini digunakan Kolmogorof-Smirnov (K-S) dan uji Shapiro-Wilk untuk menghitung distribusi normal data. Jika nilai probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05 ($>0,05$), maka data tersebut terdistribusi secara normal, dan begitupun sebaliknya.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika varian berbeda maka disebut heteroskedastisitas.

Cara memprediksi adanya gejala Heteroskedastisitas yaitu dapat melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-standardized. Jika polanya seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Tapi jika tidak ada pola yang terbentuk ataupun titik-titiknya menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Untuk menguji adanya

multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance value* untuk masing-masing variabel independen. Apabila *tolerance value* di atas 0,10 dan $VIF < 10$ maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

3.2.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda yaitu regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen (Sujarweni, 2015, hlm. 116). Adapun model persamaan regresi linier berganda tersebut adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Keterangan

- Y : Kinerja Pembiayaan Sekolah
 a : Konstanta regresi
 b1 : koefisien regresi ketepatan anggaran BOS
 b2 : koefisien regresi kecukupan anggaran BOS
 b3 : koefisien regresi sasaran Penggunaan dana BOS
 X1 : Ketepatan Anggaran BOS
 X2 : Kecukupan Anggaran BOS
 X3 : Sasaran Penggunaan Anggaran BOS

Untuk menghitung persamaan regresi yaitu menghitung, b1, b2, b3 dapat menggunakan persamaan berikut :

$$b_1 = \frac{(\sum x_i y)(\sum x_2^2) - (x_2 y)(\sum x_1 x_2)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}$$

$$b_2 = \frac{(\sum x_2 y)(\sum x_1^2) - (x_1 y)(\sum x_1 x_2)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}$$

$$b_3 = \frac{(\sum x_3 y)(\sum x_2^3) - (x_2 y)(\sum x_1 x_2)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}$$

$$a = \bar{y} - b_1\bar{x}_1 - b_2\bar{x}_2 - b_3\bar{x}_3$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Tinjauan Umum Subjek Penelitian

Program BOS yang diberikan dari pemerintah Pusat dan Provinsi untuk SMA/SMK negeri dan swasta merupakan program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan rintisan program wajib belajar 12 Tahun. Program BOS merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada SMA/SMK Negeri dan Swasta untuk membantu memenuhi biaya operasional Non-Personalia sekolah dan pembiayaan lainnya untuk menunjang proses pembelajaran. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiaya dengan dana BOS. Tujuan BOS mewujudkan layanan pendidikan menengah khususnya jenjang SMA/SMK yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat.

Program BOS bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah serta meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa serta mengurangi angka putus sekolah. Program BOS juga mewujudkan keberpihakan pemerintah (*affirmative action*) bagi siswa miskin SMA/SMK dengan membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di sekolah khususnya bagi siswa miskin serta memberikan kesempatan yang setara bagi siswa miskin SMA/SMK untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Penerapan BOS ini dilakukan di SMA/SMK negeri dan swasta yang sudah menerima nomor pokok sekolah nasional (NPSN) dan melakukan entry data secara lengkap dan benar dalam sistem dapodikdasmen. SMA/SMK negeri dan swasta yang memiliki SK pendirian sekolah (bagi SMA/SMK Negeri), memiliki izin operasional (bagi SMA/SMK swasta), dan SK pengangkatan kepala sekolah dari pemerintah daerah (bagi SMA Negeri) dan dari yayasan (bagi SMA/SMK Swasta).

4.2 Analisis Hasil Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disebarlang langsung kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mengunjungi sekolah tempat di mana responden bekerja yaitu SMA/SMK di kota Sukabumi. Kuesioner dibagikan mulai dari 27 Juli 2020 sampai dengan 17 September 2020.

Jumlah responden yang menjadi subyek penelitian ini adalah sebanyak 14 responden yang terdiri dari kepala sekolah SMA SMK Negeri dan swasta Kota Sukabumi. Dari target yang sudah ditentukan kepada seluruh responden terkumpul seluruhnya dalam waktu dua bulan, hal ini terjadi karena keterbatasan ruang sehingga responden tidak selalu ada di tempat. Walaupun begitu tingkat pengembalian yang diperoleh yaitu 100% karena semua bisa mengembalikan kuesioner yang dibagikan.

4.2.1 Uji Kualitas Data

Data variabel dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil penyebaran kuesioner yang berhubungan dengan variabel independen yaitu pengaruh Ketepatan Anggaran, Kecukupan Anggaran, dan Sasaran Anggaran, Bantuan Operasional Sekolah, dan Kinerja Pembiayaan Sekolah sebagai variabel dependen agar penelitian yang dilakukan tidak diragukan kebenarannya, maka instrumen penelitian yang berupa kuesioner harus diuji dan harus memenuhi dua syarat utama yaitu instrumen penelitian harus valid (benar dan dapat dibuktikan) dan reliabel (benar dan dapat dipercaya). Untuk itu dilakukan dua macam uji yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

4.2.1.1 Uji Validitas

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen dalam pengumpulan data untuk menguji kualitas data instrumen dalam pengumpulan data. Untuk menguji kualitas dari instrumen tersebut maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk

mengukur sejauh mana instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan menggunakan nilai korelasi perhitungan rumus korelasi *product moment* dengan bantuan *software SPSS 21 for Windows*. Selanjutnya dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi, apabila item yang mempunyai korelasi positif dengan kriteria skor total serta korelasi nya tinggi maka instrumen tersebut memiliki validitas konstruk yang baik atau dinyatakan bahwa instrumen tersebut valid.

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r_{tabel} dengan nilai r_{hitung} apabila nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka data tersebut valid jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 14 responden. Dengan tingkat signifikansi 5% maka angkakritis dari r_{tabel} sebesar 0,3044 jika nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka pertanyaan tersebut valid.

(Tabel 4.1 Pengujian validitas variable X_1)

Nomor Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,693	0,3044	Valid
2	0,756	0,3044	Valid
3	0,513	0,3044	Valid
4	0,517	0,3044	Valid
5	0,505	0,3044	Valid
6	0,727	0,3044	Valid

Sumber : Data diolah

Hasil pengujian validitas untuk item-item pertanyaan yang digunakan dalam mengukur variabel ketepatan anggaran (X_1) menunjukkan dari seluruh item atau pertanyaan yang digunakan semuanya telah mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari nilai r_{tabel} yang ditentukan yakni 0,3044 dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh Item pertanyaan yang digunakan tersebut telah menunjukkan tingkat ketepatan yang cukup baik dan dapat digunakan untuk mengukur variabel ketepatan anggaran (X_1).

(Tabel 4.2 Pengujian Validitas Variable X₂)

Nomor Item	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
1	0,458	0,3044	Valid
2	0,548	0,3044	Valid
3	0,620	0,3044	Valid
4	0,829	0,3044	Valid
5	0,807	0,3044	Valid
6	0,892	0,3044	Valid
7	0,802	0,3044	Valid
8	0,591	0,3044	Valid
9	0,502	0,3044	Valid
10	0,410	0,3044	Valid
11	0,791	0,3044	Valid
12	0,598	0,3044	Valid

Sumber : Data diolah

Hasil pengujian validitas untuk item-item pertanyaan yang digunakan dalam mengukur variabel Kecukupan Anggaran (X₂), menunjukkan dari seluruh item atau pertanyaan yang digunakan semuanya telah mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari nilai r_{tabel} yang ditentukan yakni 0,3044, dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan tersebut telah menunjukkan tingkat ketepatan yang cukup baik dan dapat digunakan untuk mengukur variabel ketepatan anggaran (X₂).

(Tabel 4.3 Pengujian Validitas X₃)

Nomor Item	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
1	0,399	0,3044	Valid
2	0,308	0,3044	Valid
3	0,519	0,3044	Valid

4	0,483	0,3044	Valid
5	0,783	0,3044	Valid
6	0,627	0,3044	Valid
7	0,704	0,3044	Valid
8	0,791	0,3044	Valid
9	0,696	0,3044	Valid
10	0,591	0,3044	Valid
11	0,381	0,3044	Valid
12	0,617	0,3044	Valid
13	0,599	0,3044	Valid
14	0,729	0,3044	Valid
15	0,705	0,3044	Valid

Sumber : Data Diolah

Hasil pengujian validitas untuk item item pertanyaan yang digunakan dalam mengukur variabel Sasaran Anggaran (X_3) menunjukkan dari seluruh item data atau pertanyaan yang digunakan, semuanya telah mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari nilai r_{tabel} yang ditentukan yakni 0,3044, dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan tersebut telah menunjukkan tingkat sasaran anggaran yang cukup baik dan dapat digunakan untuk mengukur variabel sasaran anggaran (X_3).

(Tabel 4.4 Pengujian Validitas Variable Y)

Nomor Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,755	0,3044	Valid
2	0,754	0,3044	Valid
3	0,599	0,3044	Valid
4	0,818	0,3044	Valid
5	0,806	0,3044	Valid

6	0,781	0,3044	Valid
7	0,505	0,3044	Valid
8	0,678	0,3044	Valid
9	0,768	0,3044	Valid
10	0,676	0,3044	Valid

Sumber : Data diolah

Hasil pengujian validitas untuk item item pertanyaan yang digunakan dalam mengukur variabel Kinerja Pembiayaan Sekolah (Y) menunjukkan dari seluruh item atau pertanyaan yang digunakan semuanya telah mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari nilai r_{tabel} yang ditentukan yakni 0,3044 dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan tersebut telah menunjukkan tingkat ketepatan dan cukup baik dan dapat digunakan untuk mengukur variabel kinerja pembiayaan sekolah (Y).

4.2.1.2 Uji Reliabilitas

Selain dilakukan uji validitas pengujian lain yang harus dilakukan terhadap instrumen penelitian adalah uji realibilitas terhadap kuesioner tersebut uji realibilitas dilakukan untuk menguji konsistensi dari alat ukur dalam mengukur gejala yang sama. Pengujian Reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode koefisien *Cronbatch Alpha* dengan bantuan *software SPSS 21 for Windows*. suatu variabel reliabel jika nilai alpha yang dihasilkan memberi nilai alpha $>0,60$.

Pengujian Reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan *software SPSS 21 for Windows*. Adapun hasil perhitungannya adalah sebagai berikut.

(Tabel 4.5 Hasil Uji Realibilitas)

Reability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,745	7
,758	13

,748	16
,769	11

Dari hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa untuk variabel X_1 memiliki nilai Alpha 0,745 untuk variabel X_2 memiliki nilai Alpha 0,758 dan untuk variabel X_3 memiliki nilai Alpha 0,748 serta untuk variabel Y memiliki nilai Alpha 0,769. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Alpha yang lebih besar dari 0,60 maka dapat disimpulkan pertanyaan dari seluruh variabel yang ada dinyatakan reliabel.

4.2.2 Deskripsi Variabel Ketepatan Anggaran (X_1)

Ketepatan anggaran merupakan gambaran tingkat efektivitas anggaran dari suatu pemerintah. Menurut Mahmudi (2010) efektivitas anggaran adalah salah satu konsep *Value For Money* (VFM) yaitu bentuk pengukuran kinerja yang spesifik dan unik pada organisasi sektor publik. Efektivitas anggaran merupakan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Serta ketepatan anggaran menurut (Asnawi 2013) yaitu suatu hasil pelaksanaan bantuan operasional sekolah (BOS) yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan standar dan bentuk surat pertanggung jawaban yang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis. Ketepatan yang dimaksud adalah berdasarkan ketepatan waktu penyaluran anggaran atau dana dan kelancaran pencairan dana. Berikut ini adalah hasil jawaban yang didapat dari penyebaran kuisioner mengenai ketepatan anggaran.

(Tabel 4.6 Perhitungan Frekuensi Jawaban Variabel X_1)

Dimensi	No Item	Frekuensi jawaban					Skor Item	Skor Tertinggi	Prese-ntase	Rata-rata
		5	4	3	2	1				
	1	11	2	0	1	1	66	70	91%	78,67 %
	2	5	6	0	2	1	54	70	477%	

Kesesuaian biaya dengan standar	3	13	1	0	0	0	69	70	98%	
Kelancaran Pencairan Dana	4	2	2	3	0	7	34	70	49%	68,33 %
	5	7	3	3	1	0	58	70	83%	
	6	5	5	3	2	1	51	70	73%	
							281	420	66,9%	

Sumber : Data diolah

Berdasarkan table 4.6 total skor yang diperoleh dari frekuensi jawaban untuk variable Ketepatan Anggaran adalah 281. Skor tertinggi adalah 69 yang diperoleh dari item pertanyaan nomor 3 yaitu pada indikator pengambilan dana BOS disaksikan oleh kepala sekolah dan komite sekolah, mayoritas responden memberikan jawaban pada skala “selalu disaksikan” terhadap item pernyataan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pengambilan dana BOS di SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi telah sepenuhnya dilaksanakan.

Sedangkan skor terendah sebesar 34 diperoleh dari item nomor 4, yaitu indikator “waktu penyaluran dana BOS sesuai tanggal yang sudah ditentukan” mayoritas responden memberikan pada skala “lebih dari 4 minggu dari jadwal” terhadap pertanyaan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa dana yang diberikan pemerintah melalui BOS SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi sering terjadi keterlambatan dalam penyalurannya sehingga responden banyak menjawab di jawaban item no 4. Berdasarkan skor tersebut, maka tingkat Ketepatan Anggaran dapat dihitung dengan membandingkan antara skor variable yang didapat dengan skor maksimal. Berikut ini adalah cara penghitungannya:

$$(281:420) \times 100\% = 66,9\%$$

(Tabel 4.7 Interpretasi Skor)

Presentase	Kriteria
0% - 20%	Sangat lemah / sangat tidak efektif

21% - 40%	Lemah / tidak efektif
41% -60%	Cukup / cukup efektif
61% - 80%	Kuat / efektif
81% - 100%	Sangat kuat / sangat efektif

Sumber : Ridwan, 2013:22

Dari tabel tersebut terlihat bahwa angka 66,9 berada pada kisaran 61%-80% yang termasuk kedalam kategori kuat dan efektif. Namun berdasarkan fenomena yang ada, masih banyak ditemui kelemahan-kelemahan terkait dengan ketepatan anggaran BOS itu sendiri khususnya di SMA/SMK negeri dan swasta di Kota Sukabumi. Untuk lebih terperinci, data hasil kuesioner akan dipaparkan berdasarkan dimensinya sebagai berikut :

4.2.2.1 Dimensi Kesesuaian biaya dengan standar

Tanggapan responden tentang dimensi kesesuaian biaya dengan standar dilihat pada tabel 4.8

(Tabel 4.8 Frekuensi Jawaban tentang Kesesuaian Biaya dengan Standar)

No Item	Indikator	Frekuensi Jawaban					Skor Item
		5	4	3	2	1	
1	Sekolah melakukan belanja sesuai dengan kebutuha sekolah serta sesuai dengan petunjuk teknis BOS	11	2	0	1	1	66
2	Ketersediaan dana BOS terpenuhi untuk kebutuhan sekolah	5	6	0	2	1	54
3	Pengambilan dana BOS disaksikan oleh kepala sekolah/ komite sekolah	13	1	0	0	0	67
Total							187
Rata- rata							62,33

Sumber : Data diolah

Pada tabel 4.8 diatas dapat diketahui tanggapan responden untuk item pertanyaan “Sekolah melakukan belanja sesuai dengan kebutuhan sekolah serta sesuai dengan petunjuk teknis BOS” mayoritas responden yaitu sebanyak 11 responden yang menyatakan “100% sesuai” , minoritas adalah responden yang menyatakan “>50% -70% telah sesuai” serta “<50% telah sesuai” masing-masing sebanyak 1 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas SMA dan SMK negeri dan swasta di Kota Sukabumi telah melakukan belanja sesuai dengan kebutuhan sekolah serta sesuai dengan petunjuk teknis BOS dengan sangat baik.

Tanggapan responden untuk item “Ketersediaan dana BOS terpenuhi untuk kebutuhan sekolah” mayoritas responden yaitu 6 yang menyatakan “95% telah terpenuhi” minoritas adalah responden yang menyatakan “<50% telah terpenuhi” sebanyak 1 responden. Hal ini menunjukkan bahwa Ketersediaan dana BOS terpenuhi untuk kebutuhan sekolah khususnya di SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi.

Selanjutnya tanggapan responden untuk item “Pengambilan dana BOS disaksikan oleh kepala sekolah/komite sekolah” mayoritas responden yaitu sebanyak 13 responden yang menyatakan “selalu disaksikan” minoritas adalah responden yang menyatakan “sering disaksikan” sebanyak 1 responden. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan dana BOS selalu disaksikan oleh Komite sekolah dan Kepala sekolah.

4.2.2.2 Kelancaran Pencairan Dana

Tanggapan responden tentang dimensi kelancaran pencairan dana dapat dilihat pada tabel 4.9

(Tabel 4.9 Frekuensi Jawaban tentang Kelancaran Pencairan Dana)

No Item	Indikator	Frekuensi Jawaban					Skor Item
		5	4	3	2	1	
4	Waktu Penyaluran dana BOS sesuai tanggal yang telah ditetapkan	2	2	3	0	7	34

5	Mekanisme penyaluran dana BOS sesuai mekanisme yang telah dijelaskan didalam Juknis	7	3	3	1	0	58
6	Guru dan karyawan serta komite sekolah ikut dilibatkan dalam berbagai pengambilan dana	5	3	3	2	1	51
Total							143
Rata-rata							47,67

Sumber : Data diolah

Pada tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden untuk item pertanyaan “Waktu Penyaluran dana BOS sesuai tanggal yang telah ditetapkan” mayoritas responden sebanyak 7 reponden yang menyatakan “lebih dari 4 minggu dari jadwal” minoritas adalah responden yang menyatakan “lebih dari 1 minggu dari jadwal” dan “tepat waktu” sebanyak masing-masing 2 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi menerima penyaluran dana bos tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Tanggapan responden untuk item “Mekanisme penyaluran dana BOS sesuai mekanisme yang telah dijelaskan didalam juknis. Mayoritas responden yaitu sebanyak 7 orang yang menyatakan “100% sesuai” minoritas adalah responden yang menyatakan “>50% - 70% telah sesuai” sebanyak 1 orang. Hal ini menunjukan bahwa mayoritas SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi telah menerima dana sesuai mekanisme dan juknis BOS yang telah ada.

Selanjutnya tanggapan responden untuk item “Guru dan karyawan serta komite sekolah ikut dilibtkan dalam berbagai pengambilan dana” mayoritas responden yaitu sebanyak 5 responden yang menyatakan “selalu dilibatkan “ minoritas adalah responden yang menyatakan “tidak pernah dilibatkan” sebanyak 1 responden. Hal ini menunjukan mayoritas SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi guru dan karyawn serta komite sekolah selalu dilibatkan dalam pengambilan dana.

4.2.3 Deskripsi Kecukupan Anggaran (X_2)

Kecukupan anggaran menurut (Indarto & Ayu, 2011) adalah didefinisikan sebagai tingkat persepsi individual bahwa sumber-sumber yang dianggarkan mencukupi untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang diperlukan. Kecukupan anggaran menurut Naori dan Parker (1998) adalah tingkatan dimana seseorang merasa bahwa sumber-sumber anggarannya cukup atau memadai untuk memenuhi syarat-syarat dalam bidang pekerjaannya, dimana para bawahan memiliki informasi yang berpengaruh tentang tingkatan dukungan anggaran yang dikehendaki untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan mereka. Menurut Asnawi et al., (2013) kecukupan berkenaan dengan seberapa tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah.

Berikut ini adalah hasil jawaban yang diberikan oleh responden dari penyebaran kuesioner mengenai kecukupan anggaran.

(Tabel 4.10 Perhitungan Frekuensi Jawaban Variabel X_2)

Dimensi	No Item	Frekuensi Jawaban					Skor Item	Skor Tertinggi	Presentase	Rata-rata
		5	4	3	2	1				
Pencapaian hasil yang diinginkan	7	5	5	3	1	0	56	70	71,5%	71,5%
	8	5	7	2	0	0	59	70	89%	
	9	6	5	2	0	1	57	70	54%	
Kecukupan untuk setiap kegiatan operasional	10	11	1	1	1	0	64	70	91%	88,56%
	11	6	4	2	2	0	56	70	80%	
	12	9	2	2	0	1	60	70	86%	
	13	8	2	3	1	0	59	70	84%	
	14	11	2	1	0	0	66	70	94%	
	15	7	6	1	0	0	62	70	88%	
	16	12	1	0	0	1	65	70	93%	
17	11	0	2	1	0	63	70	90%		

	18	10	2	2	0	0	64	70	91%	
Jumlah							731	840	87,02%	

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.10 total yang diperoleh dari frekuensi jawaban untuk variable Kecukupan Anggaran adalah 731. Skor tertinggi adalah 66 yang diperoleh dari item pertanyaan nomor 14 yaitu pada indikator “tercukupinya anggaran untuk penyediaan untuk langganan daya dan jasa” mayoritas responden memberikan jawaban pada skala “100% tercapai” terhadap item pernyataan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada kendala dalam penyediaan langganan daya dan jasa.

Sedangkan skor terendah sebesar 56 diperoleh dari item nomor 7 dan 11, yaitu indikator “tercapainya antara rencana dengan realisasi anggaran dilapangan” dan “Tercukupinya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler” mayoritas responden memberikan jawaban pada skala “100% tercapai” dan “95% telah tercapai” untuk pertanyaan item nomor 7 sedangkan “<50% telah tercukupi” untuk jawaban untuk item pertanyaan nomor 11. Hal ini membuktikan bahwa dana yang diberikan pemerintah melalui bos SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi dirasa dana yang diberikan masih kurang, tercapainya antara rencana dengan realisasi anggaran di lapangan dan tercukupinya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Berdasarkan skor tersebut, maka tingkat Kecukupan Anggaran dapat dihitung dengan membandingkan anatara skor variable yang didapat dengan skor maksimal. Berikut ini adalah cara penghitungannya.

$$(731 : 840) \times 100\% = 87,02\%$$

(Tabel 4.11 Interpretasi Skor)

Presentase	Kriteria
0% - 20%	Sangat lemah / sangat tidak efektif
21% - 40%	Lemah / tidak efektif
41% -60%	Cukup / cukup efektif

61% - 80%	Kuat / efektif
81% - 100%	Sangat kuat / sangat efektif

Sumber : Riduwan, 2013;22

Dari tabel tersebut terlihat bahwa angka 87,02 berada pada kisaran 81% -100% yang termasuk kedalam kategori sangat kuat dan sangat efektif. Namun berdasarkan fenomena yang ada, masih terdapat beberapa kelemahan terkait dengan kecukupan anggaran BOS itu sendiri khususnya di SMA/SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi. Untuk lebih terperinci, data hasil kuesioner akan dipaparkan berdasarkan dimensinya sebagai berikut:

4.2.3.1 Dimensi Pencapaian Hasil yang Diinginkan

Tanggapan responden tentang dimensi pencapaian hasil yang diinginkan dapat dilihat pada tabel 4.12

(Tabel 4.12 Frekuensi Jawaban tentang Pencapaian Hasil yang Diinginkan)

No Item	Indikator	Frekuensi Jawaban					Skor Item
		5	4	3	2	1	
7	Tercapainya antara rencana dengan realisasi anggaran di lapangan	5	5	3	1	0	56
8	Seberapa menyimpang output yang dihasilkan sekolah dengan yang di rencanakan	5	7	2	0	0	59
Total							115
Rata-rata							57,5

Sumber : Data diolah

Pada tabel diatas diketahui tanggapan responden untuk item pertanyaan tercapainya antara rencana dengan realisasi anggaran di lapangan mayoritas responden sebanyak masing-masing 5 responden yang menyatakan “100% tercapai” dan “95% tercapai, minoritas menjawab “>50% - 70% telah tercapai”

sebanyak 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi telah tercapai antara rencana dan realisasi anggaran di lapangan dengan baik.

Tanggapan responden untuk item “seberapa menyimoang output yang dihasilkan sekolah dengan yang direncanakan” mayoritas responden yaitu sebanyak 7 responden yang menyatakan “sedikit ada penyimpangan” minoritas adalah responden yang menyatakan “kadang-kadang ada penyimpangan” sebanyak 3 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi jarang ada penyimpangan anantara output yang dihasilkan dengan rencana sekolah sebelumnya.

4.2.3.2 Dimensi Kecukupan untuk Setiap Kegiatan Operasional

Tanggapan responden tentang dimensi Kecukupan untuk setiap kegiatan operasional dapat dilihat pada tabel 4.13

(Tabel 4.13 Frekuensi Jawaban tentang Kecukupan untuk Setiap Kegiatan Operasional)

No Item	Indikator	Frekuensi Jawaban					Skor Item
		5	4	3	2	1	
9	Tercukupinya anggaran untuk pengembangan perpustakaan	6	5	2	0	1	57
10	Tercukupinya anggaran untuk pengadaan penerimaan siswa baru	11	1	1	1	0	64
11	Tercukupinya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	6	4	2	2	0	56
12	Tercukupinya anggaran dan terlaksananya kegiatan ulangan dan ujian sekolah	9	2	2	0	1	60
13	Tercukupinya anggaran untuk penyediaan bahan-bahan habis pakai	8	2	3	1	0	59

14	Tercukupinya anggaran untuk penyediaan untuk langganan saya dan jasa	11	2	1	0	0	66
15	Tercukupinya anggaran untuk perawatan sekolah	7	6	1	0	0	62
16	Tercukupinya anggaran untuk pembayaran GTT/PTT	12	1	0	0	1	65
17	Tercukupinya anggaran untuk pengadaan dan pengembangan profesi guru	11	0	2	1	0	63
18	Tercukupinya anggaran untuk pendanaan dan pembiayaan pengelolaan BOS	10	2	2	0	0	64
Total							616
Rata-rata							61,6

Sumber : Data diolah

Pada tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden untuk item pertanyaan “Tercukupinya anggaran untuk pengembangan perpustakaan” mayoritas responden sebanyak 6 responden menyatakan “100% tercukupi” minoritas adalah yang menyatakan “<50% telah tercukupi”. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi merasakan sudah terpenuhi anggaran untuk pengembangan perpustakaan.

Tanggapan responden untuk item “Tercukupinya anggaran untuk pengadaan penerimaan siswa baru” mayoritas responden yaitu sebanyak 11 responden yang menyatakan “100% telah tercukupi” minoritas adalah responden yang menyatakan “95% telah tercukupi”, “70%-90% telah tercukupi” dan “>50% - 70% telah tercukupi” sebanyak masing-masing 1 reponden. Hal ini menunjukkan SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi sudah merasa cukup dana yang diberikan untuk kebutuhan pengadaan penerimaan siswa baru.

Selanjutnya tanggapan responden untuk item “Tercukupinya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler” mayoritas responden sebanyak 6 responden yang menyatakan “100% telah tercukupi”. Minoritas adalah responden yang menyatakan “>70% -90% telah tercukupi” dan “>50%-70% telah tercukupi” sebanyak masing 2 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi telah merasakan dana untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sudah cukup.

Tanggapan responden untuk item “tercukupinya anggaran dan terlaksananya kegiatan ulangan dan ujian sekolah” mayoritas responden yaitu sebanyak 9 responden yang menyatakan “100% tercukupi”. Minoritas adalah responden yang menyatakan “<50%-telah tercukupi” sebanyak 1 responden. Hal ini menunjukkan bahwa SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi sudah cukup dana untuk kegiatan ulangan dan ujian sekolah.

Tanggapan responden untuk item “tercukupinya anggaran untuk penyediaan bahan-bahan habis pakai” mayoritas responden yaitu sebanyak 8 responden yang menyatakan “100% tercukupi”. Minoritas adalah responden yang menyatakan “>50% -70% telah tercukupi” sebanyak 1 responden. Hal ini menunjukkan bahwa SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi sudah cukup dana untuk penyediaan bahan-bahan habis pakai.

Tanggapan responden untuk item “Tercukupinya anggaran untuk penyediaan langganan daya dan jasa” mayoritas responden yaitu sebanyak 11 responden yang menyatakan “100% tercukupi”. Minoritas adalah responden yang menyatakan “>70%-90% telah tercukupi” sebanyak 1 responden. Hal ini menunjukkan bahwa SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi sudah cukup dalam penyediaan langganan dan jasa.

Tanggapan responden untuk item “tercukupinya anggaran untuk peralatan sekolah” mayoritas responden yaitu sebanyak 7 responden yang menyatakan “100% tercukupi”. Minoritas adalah responden yang menyatakan “>70%-90% telah tercukupi” sebanyak 1 responden. Hal ini menunjukkan bahwa SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi sudah cukup anggaran untuk peralatan sekolah

Tanggapan responden untuk item “tercukupinya anggaran untuk pembayaran GTT/PTT” mayoritas responden yaitu sebanyak 12 responden yang menyatakan “selalu terbayar”. Minoritas adalah responden yang menyatakan “sering terbayar” sebanyak 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi selalu menggunakan dana BOS untuk membayar gaji guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap.

Tanggapan responden untuk item “tercukupinya anggaran untuk pengadaan dan pengembangan profesi guru” mayoritas responden yaitu sebanyak 11 responden yang menyatakan “tercukupi”. Minoritas adalah responden yang menyatakan “jarang tercukupi” sebanyak 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi sudah cukup dana untuk pengadaan dan pengembangan profesi guru.

Tanggapan responden untuk item “tercukupinya anggaran untuk pendanaan dan pembiayaan pengelolaan dana BOS” mayoritas responden yaitu sebanyak 10 responden yang menyatakan “tercukupi”. Minoritas adalah responden yang menyatakan “sering tercukupi” dan “kadang-kadang tercukupi” masing-masing sebanyak 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi sudah cukup pendanaan dan pembiayaan pengelolaan BOS

4.2.4 Deskripsi Sasaran Anggaran (X_3)

Menurut Kohler dalam Zein (2008) efektivitas sebagai kualitas, kuantitas, hasil jasa, penggunaan waktu atau pencapaian kinerja lainnya yang sebanding dengan standar yang ditentukan semula. Efektivitas pelaksanaan anggaran yaitu tercapainya sasaran anggaran baik secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan petunjuk dan teknis BOS Sasaran dalam penelitian ini merupakan untuk siapa dana BOS diberikan, tujuan dana BOS, dan dampaknya dan BOS agar tujuan dari program BOS dapat dicapai. Menurut Kenis (1979), sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Sasaran dalam penelitian sesuai petunjuk teknis BOS tahun 2015 merupakan untuk

siapa dana BOS diberikan, tujuan dana BOS, dana dampaknya dana BOS agar tujuan dari program BOS dapat dicapai.

Berikut ini adalah hasil jawaban yang diberikan oleh responden dari penyebaran kuesioner mengenai kecukupan anggaran.

(Tabel 4.14 Perhitungan Frekuensi Jawaban variable X₃)

Dimensi	No Item	Frekuensi Jawaban					Skor Item	Skor Tertinggi _i	Presentase	Rata-rata
		5	4	3	2	1				
Penerimaan dana BOS	19	3	0	2	1	8	31	70	44%	80%
	20	12	1	1	0	0	67	70	96%	
	21	14	0	0	0	0	70	70	100%	
Tujuan dana BOS	22	8	1	3	2	0	57	70	81%	78,33%
	23	1	9	4	0	0	53	70	76%	
	24	1	11	2	0	0	55	70	79%	
	25	2	7	5	0	0	53	70	76%	
	26	3	6	3	2	0	52	70	74%	
	27	4	9	1	0	0	59	70	84%	
Dampak dana BOS	28	7	5	2	0	0	61	70	87%	85,83%
	29	12	1	1	0	0	67	70	96%	
	30	7	6	1	0	0	62	70	89%	
	31	9	4	0	0	1	62	70	89%	
	32	1	9	1	0	3	47	70	67%	
	33	7	5	2	0	0	61	70	87%	
Total							857	1050	81,61%	

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.14 total skor yang diperoleh dari frekuensi jawaban untuk variable Sasaran Anggaran adalah 857. Skor tertinggi adalah 70 yang diperoleh dari

item pertanyaan nomor 21 yaitu pada indicator “Sekolah melakukan penerimaan disaksikan oleh kepala sekolah dan komite sekolah”. Mayoritas responden memberikan jawaban pada skala “selalu disaksikan” terhadap item pertanyaan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pengambilan dana BOS, kepala sekolah dan komite sekolah selalu dilibatkan dan diikutsertakan.

Sedangkan skor terendah sebesar 90 diperoleh dari item nomor 19, yaitu indicator “Sekolah menerima dana BOS tiap periodenya tepat waktu” mayoritas responden memberikan pada skala “>1 minggu atau sampai 1 bulan” terhadap pertanyaan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa dana yang diberikan pemerintah melalui BOS SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi dirasakan penyalurannya sering telat dari jadwal yang seharusnya sehingga responden banyak menjawab di jawaban item no 1. Berdasarkan skor tersebut, maka tingkat Kecukupan Anggaran dapat dihitung dengan membandingkan antara skor variable yang didapat dengan skor maksimal. Berikut ini adalah cara perhitungannya:

$$(857 : 1050) \times 100\% = 81,61$$

(Tabel 4.15 Interpretasi Skor)

Presentase	Kriteria
0% - 20%	Sangat lemah / sangat tidak efektif
21% - 40%	Lemah / tidak efektif
41% -60%	Cukup / cukup efektif
61% - 80%	Kuat / efektif
81% - 100%	Sangat kuat / sangat efektif

Sumber : Riduwan, 2013:22

Menurut tabel interpretasi tersebut, angka 81,61% berada pada kisaran 81% - 100% yang berarti memiliki kategori penilaian sangat kuat dan sangat efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa sasaran anggaran pada SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi sudah diterapkan dengan baik. Selanjutnya, penulis akan

menjabarkan jawaban responden yang didapat melalui kuesioner berdasarkan dimensinya masing-masing.

4.2.4.1 Penerimaan Dana BOS

Tanggapan responden tentang dimensi Penerimaan dana BOS dapat dilihat pada tabel 4.16.

(Tabel 4.16 Frekuensi Jawaban tentang Penerimaan dana BOS)

No Item	Indikator	Frekuensi Jawaban					Skor Item
		5	4	3	2	1	
19	Sekolah menerima dana BOS tiap periode tepat waktu	3	0	2	1	8	31
20	Sekolah menerima dana sesuai atau tidak dengan yang telah direncanakan	12	1	1	0	0	67
21	Sekolah melakukan penerimaan disaksikan oleh kepala sekolah atau komite sekolah	14	0	0	0	0	70
Total							168
Rata-rata							56

Pada tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden untuk item pertanyaan “sekolah menerima dana BOS tiap periodenya tepat waktu” mayoritas responden yaitu sebanyak 8 responden yang menyatakan “>1minggu atau 1 bulan” minoritas adalah responden yang menyatakan “>6hari dari jadwal yang ditetapkan” sebanyak 1 responden. Hal ini menunjukkan bahwa SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi masih terjadi kendala dalam keterlambatan dana yang diberikan pemerintah dalam program BOS.

Tanggapan responden untuk item “Sekolah menerima dana sesuai atau tidak dengan yang telah direncanakan” mayoritas responden yaitu sebanyak 12 responden yang menyatakan “100% sesuai” minoritas adalah responden yang

menyatakan “>70% - 90% telah sesuai” dan “>50% - 70% telah sesuai” masing-masing sebanyak 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi menerima dana telah sesuai dengan yang telah direncanakan.

Selanjutnya responden untuk item “Sekolah melakukan penerimaan disaksikan oleh kepala sekolah dan komite sekolah” seluruh responden menjawab hal yang sama yaitu “selalu disaksikan” sebanyak 14 responden. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi ketika menerima dana selalu disaksikan oleh kepala sekolah dan komite sekolah.

4.2.4.2. Dimensi Tujuan Dana BOS

Tanggapan responden tentang dimensi Penerimaan dana BOS dapat dilihat pada tabel 4.17.

(Tabel 4.17 Frekuensi Jawaban tentang Penerimaan dana BOS)

No Item	Indikator	Frekuensi Jawaban					Skor Item
		5	4	3	2	1	
22	Pengalokasian dana BOS untuk operasional non personalia sekolah yang dialokasikan dari anggaran BOS	8	1	3	2	0	57
23	Anggaran dana BOS membantu untuk mengurangi angka putus sekolah	1	9	4	0	0	53
24	Penggunaan dana BOS memengaruhi atau meningkatkan APK siswa	1	11	2	0	0	55
25	Anggaran BOS mewujudkan keberpihakan pemerintah bagi siswa miskin serta membantu tagihan baya bagi siswa miskin	2	7	5	0	0	53
26	Anggaran BOS memberikan kesempatan setara bagi siswa miskin	3	6	3	2	0	52

	untuk mendapatkan pendidikan yang telah terjangkau dan bermutu						
27	Anggaran BOS meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah	4	9	1	0	0	59
Total							329
Rata-rata							54,83

Sumber: Data diolah

Pada tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden untuk item pertanyaan “pengalokasian dana BOS untuk operasional non personalia sekolah yang dialokasikan dari anggaran BOS” mayoritas responden sebanyak 8 responden yang menyatakan “100% dialokasikan” minoritas adalah responden yang menyatakan “95% telah dialokasikan” sebanyak 1 responden. Hal ini menunjukkan bahwa SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi mengalokasikan kebutuhan untuk operasional non personalia sekolah dengan baik.

Tanggapan responden untuk item “anggaran dana BOS membantu untuk mengurangi angka putus sekolah” mayoritas responden yaitu sebanyak 9 responden yang menyatakan “95% mengurangi” minoritas adalah responden yang menyatakan “100%telah mengurangi” sebanyak 1 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi dampak dana bos ini benar-benar bisa mengurangi angka putus sekolah meskipun tidak 100% dapat mengurangi.

Selanjutnya responden untuk item “Penggunaan dana BOS memengaruhi dalam meningkatkan APK siswa” mayoritas responden yaitu sebanyak 11 responden yang menyatakan “95% meningkatkan” minoritas adalah responden yang menjawab “100% telah meningkatkan” sebanyak 1 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas SMA dan SMK di kota Sukabumi telah meningkatkan APK siswa dari dana BOS yang diberikan pemerintah meskipun tidak 100% dapat meningkatkan APK siswa.

28	Terpenuhinya bahan-bahan habis pakai	7	5	2	0	0	61
29	Terpenuhinya langganan daya dan jasa	12	1	1	0	0	67
30	Terawatnya sekolah	7	6	1	0	0	62
31	Terpenuhinya anggaran untuk para GTT/PTT	9	4	0	0	1	62
32	Menurunnya angka putus sekolah	1	9	1	0	3	47
33	Terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah	7	5	2	0	0	61
Total							360
Rata-rata							60

Sumber : Data diolah

Pada tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden untuk item pertanyaan “Terpenuhinya bahan-bahan habis pakai” mayoritas responden yaitu sebanyak 7 responden yang menyatakan “100% terpenuhi” minoritas adalah responden yang menyatakan “>70%-90% telah terpenuhi” sebanyak 2 responden. Hal ini menunjukkan bahwa SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi selalu terpenuhi untuk kebutuhan bahan-bahan habis pakai.

Tanggapan responden untuk item “terpenuhinya langganan daya dan jasa” mayoritas responden yaitu sebanyak 12 responden yang menyatakan “100% terpenuhi” minoritas adalah responden yang menyatakan “95% terpenuhi” dan “>70%-90% terpenuhi” masing-masing sebanyak 1 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi selalu terpenuhi untuk langganan dan jasa dari dana BOS tersebut.

Selanjutnya tanggapan responden untuk item “Terawatnya sekolah” mayoritas responden yaitu sebanyak 7 responden yang menyatakan “terawat” minoritas adalah responden yang menjawab “kadang-kadang terawat” sebanyak 1 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas SMA dan SMK di kota Sukabumi sudah

merawat sekolahnya meskipun ada sebagian kecil responden yang merasakan sekolahnya jarang terawat.

Tanggapan responden untuk item “terpenuhinya anggaran untuk para guru GTT/PTT” mayoritas responden yaitu sebanyak 9 responden yang menyatakan “100% terpenuhi” minoritas adalah responden yang menyatakan “<50% terpenuhi” sebanyak 4 orang. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi sudah merasa cukup dalam memenuhi kewajibannya untuk guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap meskipun masih ada sebagian kecil yang merasa belum cukup terpenuhi.

Tanggapan responden untuk item “menurunnya angka putus sekolah” mayoritas responden yaitu sebanyak 9 responden yang menyatakan “95% menurun” minoritas adalah responden yang menyatakan “95% menurun” dan “<71% - 90% menurun” masing-masing sebanyak 1 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi hampir sebagian besar anggaran BOS dapat menurunkan angka putus sekolah.

Tanggapan responden untuk item “terpenuhinya sarana dan prasarana” mayoritas responden yaitu sebanyak 7 esponden yang menyatakan “100% terpenuhi” minoritas adalah responden yang menyatakan “71%-90% terpenuhi” sebanyak 2 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi merasa terpenuhi untuk kebutuhan sarana dan prasarana sekolah.

4.2.5 Deskripsi variable Kinerja Pembiayaan Sekolah (Y)

Menurut Mahsun (2014, hlm 53) Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atas program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, nilai dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Organisasi sector public merupakan suatu entitas tempat terjadinya suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai macam fungsi dari kinerja operasiona yang bekerja secara sistematis demi pencapaian suatu tujuan tertentu. Demi pencapaian tujuan tersebut, pihak-pihak

yang berkepentingan dalam organisasi tersebut harus bekerja sama secara sistematis untuk menghasilkan kinerja yang optimal.

Berikut ini adalah hasil jawaban yang diberikan oleh responden dari penyebaran kuesioner mengenai kinerja pembiayaan sekolah di kota Sukabumi.

(Tabel 4.19 Perhitungan Frekuensi Jawaban Variabel Y)

Dimensi	No Item	Frekuensi Jawaban					Skor Item	Skor Tertinggi	Presentase	Rata-rata
		5	4	3	2	1				
Ekonomi	34	2	7	4	0	1	51	70	73%	71,75%
	35	1	8	4	1	0	51	70	73%	
	36	7	5	2	0	0	61	70	87%	
	37	0	6	2	2	4	38	70	54%	
Efisien	38	1	10	0	2	1	50	70	71%	60%
	39	1	4	6	0	3	42	70	60%	
	40	1	2	5	0	6	34	70	49%	
Efektif	41	6	5	3	0	0	59	70	84%	83%
	42	3	9	2	0	0	57	70	81%	
	43	4	9	1	0	0	59	70	84%	
Jumlah							502	700	71,71%	

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.19 total skor yang diperoleh dari frekuensi jawaban untuk variable Sasaran Anggaran adalah 502. Skor tertinggi adalah 61 yang diperoleh dari item pertanyaan nomor 36 yaitu pada indikator “Melaksanakan pengadaan barang atau jasa dengan kualitas terbaik” mayoritas responden memberikan jawaban pada skala “seluruh dilakukan” terhadap item pertanyaan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa sekolah melakukan pengadaan barang dan jasa dengan kualitas terbaik.

Sedangkan skor terendah sebesar 34 diperoleh dari item 40, yaitu indicator “pengalihan aktivitas dan fungsi yang tidak menambah nilai kesejahteraan dan

justru membebani sekolah” mayoritas memberikan pada skala “tidak dialihkan” terhadap pertanyaan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa sekolah tidak membuang kegiatan yang tidak penting karena menurut sekolah kegiatan tersebut dianggap dapat mengganggu proses pembelajaran.

Berdasarkan skor tersebut, maka tingkat Kecukupan Anggaran dapat dihitung dengan membandingkan antara skor variable yang didapat dengan skor maksimal.

Berikut ini adalah cara penghitungannya:

$$(502 : 700) \times 100\% + 71,71 \%$$

(Tabel 4.20 Interpretasi Skor)

Presentase	Kriteria
0% - 20%	Sangat lemah / sangat tidak efektif
21% - 40%	Lemah / tidak efektif
41% -60%	Cukup / cukup efektif
61% - 80%	Kuat / efektif
81% - 100%	Sangat kuat / sangat efektif

Sumber : Riduwan, 2013:22

Berdasarkan tabel interpretasi tersebut, angka 71,71% berada pada kisaran 61% - 80% yang berarti memiliki kategori penilaian kuat dan efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kinerja Pembiayaan Sekolah di kota Sukabumi telah menerapkan konsep *value for money* untuk kinerjanya. Namun dapat dilihat masih ada beberapa sekolah yang menjawab beberapa pertanyaan dengan jawaban tidak pernah. Hal ini menandakan bahwa masih ada beberapa sekolah yang belum menerapkan beberapa aspek terkait *value for money*. Untuk lebih terperinci, data hasil kuesioner akan dipaparkan berdasarkan dimensinya sebagai berikut:

4.2.5.1. Dimensi Ekonomi

Tanggapan responden tentang dimensi Ekonomi dapat dilihat pada tabel 4.21

(Tabel 4.21 Frekuensi Jawaban Dimensi Ekonomi)

No Item	Indikator	Frekuensi Jawaban					Skor Item
		5	4	3	2	1	
34	Sekolah menggunakan harga terendah dalam penyusunan rencana anggaran	2	7	4	0	1	51
35	Sekolah menggunakan biaya terendah dalam pengadaan barang	1	8	4	1	0	51
36	Melaksanakan pengadaan barang atau jasa dengan kualitas terbaik	7	5	2	0	0	61
37	Sekolah melaksanakan program berturut-turut dengan biaya di tahun ke-2 lebih kecil dari tahun sebelumnya	0	6	2	2	4	38
Total							201
Rata-rata							50,25

Sumber : Data diolah

Pada tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden untuk item pertanyaan “Sekolah menggunakan harga terendah dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran” mayoritas responden yaitu sebanyak 7 responden yang menyatakan “sebagian besar dilakukan” minoritas adalah responden yang menyatakan “tidak sama sekali” sebanyak 1 responden. Hal ini menunjukkan bahwa SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi selalu melakukan pembelian dengan harga terendah dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran.

Tanggapan responden untuk item “sekolah menggunakan biaya terendah dalam pengadaan barang” mayoritas responden yaitu sebanyak 8 responden yang menyatakan “sebagian besar dilakukan ” minoritas adalah responden yang menyatakan”seluruhnya dilakukan” dan “sebagian kecil dilakukan ” masing-masing sebanyak 1responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi selalu menggunakan biaya terendah dalam pengadaan barang.

Selanjutnya tanggapan responden untuk item “melaksanakan pengadaan barang atau jasa dengan kualitas terbaik” mayoritas responden yaitu sebanyak 7 responden yang menyatakan “seluruhnya dilakukan ” minoritas adalah responden yang menjawab “sebagian dilakukan” sebanyak 2 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas SMA dan SMK di kota Sukabumi selalu melaksanakan pengadaan barang atau jasa dengan kualitas terbaik.

Tanggapan responden untuk item “sekolah melaksanakan program berturut-turut dengan biaya di tahun ke-2 lebih kecil dari tahun sebelumnya ” mayoritas responden yaitu sebanyak 6 esponden yang menyatakan “95% dilakukan ” minoritas adalah responden yang menyatakan “>50% - 70 % dilakukan” dan “70%-90% dilakukan” masing-masing sebanyak 2 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi selalu melakukan program biaya lebih kecil dari tahun sebelumnya.

4.2.5.2. Dimensi Efisiensi

Tanggapan responden tentang dimensi efisiensi dapat dilihat pada tabel 4.22

(Tabel 4.22 Frekuensi Jawaban Dimensi Efisiensi)

No Item	Indikator	Frekuensi Jawaban					Skor Item
		5	4	3	2	1	
38	Sekolah memilih strategi yang memerlukan biaya terendah untuk mencapai tujuan sekolah	1	10	0	2	1	50
39	Melakukan pengurangan aktivitas yang tidak menambah nilai bagi kesejahteraan sekolah	1	4	6	0	3	42
40	Pengalihan aktivitas dan fungsi yang tidak menambah nilai bagi kesejahteraan sekolah dan justru membebani anggaran	1	2	5	-	6	34
Total							126
Rata-rata							42

Sumber : Data diolah

41	Kinerja dan program yang dibuat selalu mengacu pada visi dan misi organisasi	6	5	3	0	0	59
42	Sekolah menghasilkan pelayanan public yang lebih baik dari sebelumnya	3	9	2	0	0	57
43	Sekolah berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat	4	9	1	0	0	59
Total							175
Rata-rata							58,33

Sumber : Data diolah

Pada tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden item pernyataan “Kinerja dan Program yang dibuat selalu mengacu pada visi dan misi organisasi” mayoritas responden yaitu sebanyak 6 reponden yang menyatakan “100% mengacu” minoritas adalah responden yang menyatakan “>70% - 90% telah mengacu” sebanyak 3 responden. Hal ini menunjukkan bahwa SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi selalu mengacu pada visi dan misi organisasi untuk kinerja dan program yang telah dibuat.

Tanggapan responden untuk item “sekolah menghasilkan pelayanan publik ang lebih baik dari sebelumnya” mayoritas responden yaitu sebanyak 9 responden yang menyatakan “ 95% telah menghasilkan” minoritas adalah responden yang menyatakan “>70% - 90% telah menghasilkan ” sebanyak 2 responden . Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas SMA dan SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi selalu menghasikan pelayanan publik yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Selanjutnya tanggapan responden untuk item “sekolah berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat” mayoritas responden yaitu sebanyak 9 responden yang menyatakan “95% berupaya” minoritas adalah responden yang menjawab “>70%-90% berupaya” sebanyak 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas SMA dan SMK di kota Sukabumi selalu berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

4.2.6 Transformasi Data

Data mengenai variable-variabel penelitian melalui kuesioner adalah ada ordinal, sedangkan syarat untuk dapat digunakannya statistik sebagai alat analisis utama dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sekurang-kurangnya data yang berskala interval, sebelum dianalisis lebih lanjut, data ordinal yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner selanjutnya dijadikan data interval melalui *method successive interval* (MSI). Hasil MSI untuk setiap variable dapat dilihat pada lampiran.

4.2.7 Uji Asumsi Klasik

Data penelitian yang diperoleh dinaikkan skala ukurannya menjadi skala interval, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Sebelum melakukan analisis data, yang terlebih dahulu dilakukan adalah melakukan uji asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik yang akan diuji adalah sebagai berikut:

4.2.7.1 Uji Normalitas Data

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan uji *Kolmogorof-Smirnov*. Karena data yang diperoleh dalam penelitian ini hanya berjumlah 40, maka penulis menambahkan uji *Shapiro-Wilk* agar uji normalitasnya lebih akurat. Hasil pengujian normalitas didapat dengan bantuan *software SPSS 21 for windows*. Ditampilkan pada tabel dibawah ini:

(Tabel 4.24 Hasil Uji Normalitas Data)

Test of Normality

	Kolmogorof-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	statistic	Df	Sig.	statistic	df	Sig.
Ketepatan_Anggaran	,101	40	,200*	,965	40	,256
Sasaran_Anggaran	,118	40	,166	,952	40	,090
Kecukupan_Anggaran	,122	40	,140	,968	40	,316
Kinerja_Pembiayaan_Sekolah	,128	40	112	,963	40	,206

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan tabel 4.24 terlihat bahwa semua variable dari variable Ketepatan Anggaran (X_1), Kecukupan Anggaran (X_2), Sasaran Anggaran (X_3) maupun Kinerja Pembiayaan Sekolah (Y) masing-masing memiliki angka signifikan. Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data distribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan tabel 4.24 tersebut terdapat kolom Sig. untuk data ketepatan anggaran (X_1) 0,200, untuk variable sasaran anggaran (X_2) ,166, untuk variable kecukupan anggaran (X_3) 0,140, dan untuk kinerja pembiayaan sekolah (Y) 112. Hasil tersebut menunjukkan data ketepatan anggaran berdistribusi normal dikarenakan $0,200 > 0,05$, kecukupan anggaran berdistribusi normal dikarenakan $0,140 > 0,05$, sasaran anggaran berdistribusi normal dikarenakan $0,166 > 0,05$ dan kinerja pembiayaan sekolah berdistribusi normal dikarenakan $112 > 0,05$. maka sesuai dengan uji normalitas yang telah dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS 21 *for windows* didapatkan bahwa data yang digunakan untuk penelitian ini berdistribusi normal.

(Tabel 4.25 Hasil Multikolinearitas)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2,405	3,846		2,290	,774		
Ketepatan Anggaran	1,378	,302	,191	3,251	,008	,578	1,730
Kecukupan Anggaran	1,198	,188	,200	2,101	,035	,343	2,912
Sasaran Anggaran	,524	,170	,603	3,081	,004	,350	2,854

a. Dependent Variable: Kinerja Pembiayaan Sekolah

Sesuai dengan ketentuan uji multikolinieritas, jika nilai VIF kurang dari 10 dan *tolerance value* di atas 0,01 maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Dilihat dari tabel 4.14 nilai VIF kurang dari 10 dan *tolerance value* di atas 0,01

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam data penelitian ini.

4.2.8 Pengujian Hipotesis

4.2.8.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hipotesis penelitian yang telah dirumuskan, maka analisis statistik yang tepat untuk digunakan adalah teknik analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan nilai pengaruh tiga variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel atau lebih dari satu variabel terikat. (Riduwan dan Sunarto, 2012, hlm. 108). Pada analisa regresi linier berganda akan ditentukan faktor faktor manakah yang telah ditetapkan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Adapun hasil dari analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan *software SPSS 21 for Windows* ditampilkan pada tabel di bawah ini.

(Tabel 4.26 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,405	3,846		2,290	,774
Ketepatan Anggaran	1,378	,302	,191	3,251	,008
Kecukupan Anggaran	1,198	,188	,200	2,101	,035
Sasaran Anggaran	,524	,170	,603	3,081	,004

a. Dependent Variable: Kinerja Pembiayaan Sekolah

$$Y = a + b1 x1 + b2x2+b3x3$$

Pada penelitian ini, faktor yang menjadi variabel dependen, dan faktor yang menjadi variabel independen yaitu:

X_i: Ketepatan Anggaran BOS

X₂: Kecukupan Anggaran BOS

X3: Sasaran Penggunaan Anggaran BOS

\hat{Y} : Kinerja Pembiayaan Sekolah

Berdasarkan hasil dari perhitungan tersebut menunjukkan nilai konstanta (α) sebesar (2,405) nilai (β_1) yaitu ke efisien regresi sebesar (1,378) dan nilai (β_2) sebesar (1,198) dan nilai (β_3) sebesar (0,524). Maka berdasarkan perhitungan tersebut ditentukan suatu persamaan regresi yaitu sebagai berikut.

$$\hat{Y} = 2,405 + 1,378x_1 + 1,198x_2 + 0,524x_3$$

Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing- masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen maka dilakukan uji t yang dapat dilihat dari tabel 4.26 hasil dari regresi berganda. Berdasarkan tabel 4.26 di atas dapat dikemukakan nilai t hitung dari setiap variabel yaitu (X_1) sebesar (3,251), (X_2) sebesar (2,101) dan (X_3) sebesar (3,081).

Uji hipotesis yang dihitung menggunakan SPSS 21 dengan taraf signifikansi 5%. Maka, kriteria pengujian hipotesis untuk masing-masing variable adalah sebagai berikut :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika probabilitas $>, 0,05$, artinya, H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika probabilitas $<, 0,05$, artinya, H_0 ditolak dan H_a diterima

Berdasarkan perhitungan SPSS tersebut dapat diketahui bahwa df adalah 40, seperti pada tabel 4.24. setelah melihat df tersebut, maka dicari pada tabel distribusi t_{tabel} . Pada tabel distribusi t_{tabel} df 40 di 0,05 diketahui bahwa t_{tabel} adalah 1,683 dan t_{hitung} menurut tabel 4.26 adalah (X_1) 3,251 , (X_2) 2,101 dan (X_3) 3,081.

4.2.8.2 Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bagaimana pengendalian ketepatan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pembiayaan sekolah. Perumusan hipotesis untuk uji hipotesis ketepatan anggaran adalah sebagai berikut.

Ha: Ketepatan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pembiayaan sekolah.

Ho: Ketepatan anggaran tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pembiayaan sekolah.

Adapun hipotesis statistik yang diuji dalam hipotesis pertama ini adalah:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka Ho ditolak dan Ha diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka Ho diterima dan Ha ditolak

Berdasarkan tabel 4.26 diperoleh t_{hitung} untuk ketepatan anggaran (X_1) sebesar 3,251. $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $3,251 > 1,683$ maka Ho ditolak dan Ha diterima. maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketepatan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pembiayaan sekolah.

4.2.8.3 Pengujian Hipotesis Kedua

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bagaimana kecukupan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pembiayaan sekolah. Perumusan hipotesis untuk uji hipotesis kecukupan anggaran adalah sebagai berikut.

Ha: Kecukupan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pembiayaan sekolah.

Ho: Kecukupan anggaran tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pembiayaan sekolah.

Adapun hipotesis statistik yang diuji dalam hipotesis kedua ini adalah:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka Ho ditolak dan Ha diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka Ho diterima dan Ha ditolak

Berdasarkan tabel 4.26 diperoleh t_{hitung} untuk ketepatan anggaran (X_2) sebesar 2,101. $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,101 > 1,683$ maka Ho ditolak dan Ha diterima. . Maka dapat diambil kesimpulan bahwa kecukupan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pembiayaan sekolah.

4.2.8.4 Pengujian Hipotesis Ketiga

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bagaimana sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pembiayaan sekolah. Perumusan hipotesis untuk uji hipotesis sasaran anggaran adalah sebagai berikut.

Ha: Sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pembiayaan sekolah.

Ho: Sasaran anggaran tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pembiayaan sekolah.

Adapun hipotesis statistik yang diuji dalam hipotesis kedua ini adalah:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka Ho ditolak dan Ha diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka Ho diterima dan Ha ditolak

Berdasarkan tabel 4.26 diperoleh t_{hitung} untuk ketepatan anggaran (X_3) sebesar 3,081. $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $3,081 > 1,683$ maka Ho ditolak dan Ha diterima. maka dapat diambil kesimpulan bahwa sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pembiayaan sekolah.

4.3 Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian kali ini mengacu pada rumusan masalah yang telah ditentukan pada awal penelitian yang terdapat pada bab 1. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah, (1) bagaimana pengaruh ketepatan anggaran BOS terhadap kinerja pembiayaan sekolah, (2) bagaimana pengaruh kecukupan anggaran BOS terhadap kinerja pembiayaan sekolah, (3) bagaimana pengaruh sasaran anggaran BOS terhadap kinerja pembiayaan sekolah, (4) bagaimana pengaruh ketepatan anggaran, kecukupan anggaran dan sasaran anggaran BOS terhadap kinerja pembiayaan sekolah. Setelah dilakukan uji analisis data dan pengujian hipotesis berdasarkan perhitungan statistika dengan alat bantu *software IBN SPSS 21 for Windows* untuk menguji ketiga hipotesis tersebut, maka penulis dapat menjelaskan hasil analisis data dan uji hipotesis tersebut sebagai berikut.

4.3.1 Pengaruh Ketepatan Anggaran BOS terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah

Anggaran dalam organisasi sektor publik termasuk dalam lembaga pendidikan sangat penting, karena: a. Kebutuhan dan keinginan masyarakat tak terbatas dan selalu berkembang sementara sumber daya yang ada terbatas, sehingga perlu adanya pilihan dan prioritas-prioritas, b. anggaran dipakai untuk menunjukkan kepada publik bahwa dana publik yang digunakan oleh organisasi atau lembaga dapat dipertanggung jawabkan. Anggaran merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik, c. anggaran merupakan pengarah dan pemotivasi dalam mencapai tujuan organisasi. Ketepatan anggaran berkaitan dengan sasaran dari setiap kegiatan agar tercapai anggaran (McPhee, 2008). Hal ini didukung dengan pendapat Mulyadi (2001:489) yang menyatakan salah satu karakteristik anggaran, menganalisis dan menjelaskan kinerja keuangan anggaran serta selisinya. Serta menurut (Asnami et al., 2013) yaitu suatu hasil pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan standard dan bentuk surat pertanggung jawaban yang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis.

Berdasarkan data yang telah diolah, Ketepatan anggaran yang diterapkan di SMA/SMK negeri dan swasta di Kota Sukabumi sudah sangat kuat dan efektif. Hal ini terlihat dari persentase yang diperoleh dari perhitungan skor kuisisioner sebesar 66,9%. Apabila dilihat dari hasil analisis data, ketepatan anggaran memiliki nilai koefisien regresi yang didapat atas hasil regresi linier berganda positif 1,378. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik ketepatan anggaran maka akan semakin baik pula kinerja sekolah di Kota Sukabumi.

Berdasarkan perhitungan analisis regresi berganda dengan bantuan *software* IBM SPSS 21 *for windows* terhadap 14 kuisisioner yang disebar di SMA/SMK negeri dan Swasta di Kota Sukabumi menunjukkan adanya pengaruh yang positif dari Ketepatan anggaran terhadap kinerja pembiayaan sekolah. Artinya, apabila variabel ketepatan anggaran meningkat maka kinerja pembiayaan sekolah juga akan meningkat

Penelitian ini mendukung dengan penelitian Anisa (2013), Anjarwati (2012) serta Darma (2004) yang meneliti tentang ketepatan anggaran serta pengendalian

akuntansi mengenai kinerja manajerial mendapatkan hasil yang positif signifikan. Banyak interaksi informal terjadi antara manajer dengan manajer atau manajer dan pengendalian formal. Sistem pengendalian manajerial sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja SKPD dalam penelitian ini memiliki hasil yang searah dengan penelitian sebelumnya oleh Tresnawati (2012) mengenai pengendalian internal pada kinerja pemerintahan Kota Bandung berada dalam interval baik dengan hasil positif, serta penelitian yang dilakukan oleh Yosefrinaldi (2011) serta Febriati (2011) dengan hasil yang diperoleh baik positif signifikan dalam mempengaruhi akuntabilitas kinerja.

4.3.2 Pengaruh Kecukupan Anggaran BOS terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah

Kecukupan anggaran menurut (Indarto & Ayu, 2011) adalah didefinisikan sebagai tingkat persepsi individual bahwa sumber-sumber yang dianggarkan mencukupi untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang diperlukan. Serta kecukupan anggaran menurut Naori dan Parker (1998) adalah tingkatan dimana seseorang merasa bahwa sumber-sumber anggarannya cukup atau memadai untuk memenuhi syarat-syarat dalam bidang pekerjaannya, dimana para bawahan memiliki informasi yang berpengaruh tentang tingkatan dukungan anggaran yang dikehendaki untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan mereka. Serta menurut (Asnawi et al., 2013) menjelaskan kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Jadi untuk terselenggaranya suatu kegiatan atau pekerjaan harus mempunyai kecukupan anggaran yang baik, karena jika tidak kegiatan tersebut akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner pada SMA/SMK negeri dan swasta di Kota Sukabumi untuk variabel kecukupan anggaran diperoleh rata-rata skor 87,02 dan termasuk dalam kategori sangat kuat dan sangat efektif. Apabila dilihat dari hasil analisis data, kecukupan anggaran memiliki nilai koefisien regresi yang didapat atas hasil regresi linier berganda positif 1,198. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan anggaran di lingkup sekolah

baik SMA dan SMK di Kota Sukabumi sudah kuat dan efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik kecukupan anggaran maka akan semakin baik pula kinerja sekolah di Kota Sukabumi.

Sesuai perhitungan analisis regresi berganda dengan bantuan *software* IBM SPSS 21 *for windows* terhadap 14 kuesioner yang disebar di SMA/SMK negeri dan swasta di Kota Sukabumi menunjukkan adanya pengaruh positif dari kecukupan anggaran. Artinya apabila variabel kecukupan anggaran meningkat maka kinerja pembiayaan sekolah juga akan meningkat.

Dalam penelitian Oniek dan Irma (2013) hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kecukupan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Jember dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kecukupan anggaran dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Jember, diterima. Berpengaruhnya kecukupan anggaran terhadap kinerja karyawan PT. bank CIMB Niaga, Tbk cabang Jember mengindikasikan bahwa dengan anggaran yang tersedia, karyawan PT. bank CIMB Niaga, Tbk cabang Jember dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai yang diharapkan, mempercepat pekerjaan, dan dapat menyelesaikan tugas seperti yang diharapkan. Namun dalam variabel ini menghasilkan perbedaan kesimpulan kemungkinan responden yang mengisi dan tempat penelitian yang berbeda di instansi sekolah dan penelitian yang dilakukan oniek dan Irma di sektor perbangkan.

4.3.3 Pengaruh Sasaran Anggaran BOS terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah

Menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksanaan anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh sebab itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab

untuk menyusun dan melaksanakannya. Serta sasaran anggaran dalam penelitian sesuai petunjuk teknis BOS tahun 2015 merupakan untuk siapa dana BOS diberikan, Dan dampaknya dana BOS agar tujuan dari program BOS dapat dicapai.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner pada SMA/SMK negeri dan swasta di kota Sukabumi untuk variabel sasaran anggaran diperoleh rata-rata skor 81,61. Apabila dilihat dari hasil analisis data, sasaran anggaran memiliki nilai koefisien regresi yang didapat atas hasil regresi linier berganda positif 0,524. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran anggaran di lingkup sekolah baik SMA dan SMK di Kota Sukabumi sudah kuat dan efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik sasaran anggaran maka akan semakin baik pula kinerja sekolah di Kota Sukabumi. Berdasarkan perhitungan analisis regresi berganda dengan bantuan software IBM SPSS 21 For windows terhadap 14 kuesioner yang disebar di SMA SMK Negeri dan swasta di kota Sukabumi menunjukkan adanya pengaruh yang positif dari sasaran anggaran terhadap kinerja pembiayaan sekolah. Artinya apabila variabel sasaran anggaran meningkat maka kinerja pembiayaan sekolah juga akan meningkat.

Penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Dharma (2004) adanya hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja dalam konteks pemerintah daerah menunjukkan hasil yang signifikan. Sebaliknya penelitian Ade (2002) menunjukkan kejelasan anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial. Menurut Kennis (1979) dalam Budi (2006) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran itu dipahami oleh orang yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut. Oleh karena sasaran anggaran pemerintah daerah dinyatakan secara jelas, spesifik dan mudah dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab yang melaksanakannya.

4.3.4 Pengaruh Ketepatan Anggaran Kecukupan Anggaran dan Sasaran Anggaran BOS terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah

Dari data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa SMA SMK Negeri dan swasta di kota Sukabumi telah melaksanakan ketepatan

anggaran, kecukupan anggaran dan sasaran anggaran dengan baik. Meskipun belum dilaksanakan secara menyeluruh. Berdasarkan perhitungan analisis regresi berganda dengan bantuan software IBM SPSS 21 *for windows* terhadap 14 kuesioner yang disebar the SMA/SMK Negeri dan swasta di kota Sukabumi menunjukkan adanya pengaruh dari ketepatan anggaran, kecukupan anggaran dan sasaran anggaran terhadap kinerja pembiayaan sekolah.

Ketepatan anggaran, kecukupan anggaran, dan sasaran anggaan terhadap kinerja pembiayaan sekolah ini dapat dilihat dari persamaan regresi $\hat{Y} = 2,405 + 1,378x_1 + 1,198x_2 + 0,524x_3$, artinya apabila kecepatan anggaran meningkat maka asumsi bahwa kinerja pembiayaan sekolah juga meningkat, begitu juga untuk variabel sasaran anggaran menurun maka kinerja pembiayaan sekolah juga menurun dan variabel anggaran meningkat maka kinerja pembiayaan sekolah juga akan meningkat, maka dilakukan perhitungan statistik dengan menggunakan uji statistik F. Berdasarkan perhitungan uji F diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($5,505 > 4,17$) maka H_0 ditolak. Artinya ketepatan anggaran, kecukupan anggaran dan sasaran anggaran bos berpengaruh bersama sama terhadap kinerja pembiayaan sekolah.

Penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan (McPhee, 2008) ketepatan anggaran berkaitan dengan sasaran dari setiap kegiatan agar tercapai anggaran yang diharapkan. Hal ini didukung dengan pendapat Mulyadi (2001:489) Yang menyatakan salah satu karakteristik anggaran menganalisis dan menjelaskan kinerja keuangan anggaran serta selisihnya.

Menurut (Asnawi et al., 2013), suatu hasil pelaksanaan bantuan operasional sekolah bos yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan standar dan bentuk surat pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan juklat dan juknis. Serta menurut makmur (2011: 7-9) mengungkapkan indikator efektivitas dan ketepatan anggaran khususnya di sektor corporate dilihat dari beberapa segi kriteria (1) ketepatan waktu, (2) ketepatan perhitungan biaya, (3). Ketepatan dalam pengukuran, (4). Ketepatan dalam menentukan pilihan, (5) kecepatan berfikir, (6) ketepatan dalam menentukan tujuan dan ketepatan sasaran. Sedangkan untuk kecukupan anggaran menurut (Indarto dan Ayu 2011) di definisikan sebagai tingkat persepsi individual

bahwa sumber-sumber yang dianggarkan mencukupi untuk melaksanakan aktivitas aktivitas yang diperlukan.

Kecukupan anggaran menurut Naori dan Parker (1998) adalah tingkatan di mana seseorang merasa bahwa sumber sumber anggarannya cukup atau memadai untuk memenuhi syarat syarat dalam bidang pekerjaannya, di mana para bawahan memiliki informasi yang berpengaruh tentang tingkatan dukungan anggaran yang dikehendaki untuk menyelesaikan tugas tugas dalam bidang pekerjaan mereka. Sasaran anggaran dalam penelitian sesuai petunjuk teknis BOS tahun 2015 merupakan untuk siapa dana BOS diberikan, tujuan dana BOS, dan dampaknya dana bos agar tujuan dari program BOS dapat dicapai. Oleh karena itu, ketika ketepatan anggaran, kecukupan anggaran dan sasaran anggaran berjalan dengan baik maka akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja terutama kinerja pembiayaan sekolah, artinya ketika anggaran masuk dengan tepat dan sasaran yang dituju dengan baik maka akan meningkatkan kualitas sekolah dan akan meningkatkan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan masing masing sekolah yang ingin dicapai.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan mengenai Pengaruh Ketepatan Anggaran, Kecukupan Anggaran dan Sasaran Anggaran Bantuan Operasional Sekolah terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Anggaran dalam organisasi sektor publik termasuk dalam lembaga pendidikan sangat penting. Ketepatan anggaran berkaitan dengan sasaran dari setiap kegiatan agar tercapai. Berdasarkan data yang telah diolah, ketepatan anggaran yang diterapkan di SMA/SMK Negeri dan Swasta di Kota Sukabumi sudah sangat efektif. Hal ini sesuai dengan persentasi perhitungan kuesioner terhadap ketepatan anggaran sebesar 66,9% , selain itu dari hasil analisis regresi, didapat angka 1,378. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik ketepatan anggaran maka semakin baik pula kinerjanya.
2. Kecukupan anggaran merupakan sebuah persepsi individual bahwa setiap sumber yang dianggarkan cukup untuk melaksanakan aktivitas yang diperlukan. Berdasarkan data yang telah diolah, kecukupan anggaran yang diterapkan di SMA/SMK Negeri dan Swasta di Kota Sukabumi sudah sangat efektif. Hal ini sesuai dengan persentasi perhitungan kuesioner terhadap ketepatan anggaran sebesar 87% dan termasuk dalam kategori sangat kuat dan sangat efektif selain itu dari hasil analisis regresi, didapat angka 1,198. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik kecukupan anggaran maka semakin baik pula kinerjanya.
3. Setiap sasaran anggaran disesuaikan dengan tujuan anggaran secara jelas dan spesifik agar anggaran dapat jelas dipertanggung jawabkan. Berdasarkan data yang telah diolah, sasaran anggaran yang diterapkan di SMA/SMK Negeri dan Swasta di Kota Sukabumi sudah sangat efektif. Hal ini sesuai dengan persentasi perhitungan kuesioner terhadap ketepatan anggaran sebesar 81,6% dan termasuk

dalam kategori sangat kuat dan sangat efektif selain itu dari hasil analisis regresi, didapat angka 0,524. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik sasaran anggaran maka semakin baik pula kinerjanya.

4. Kinerja pembiayaan sekolah sejatinya dapat dipengaruhi banyak hal, diantaranya ketepatan anggaran, kecukupan anggaran, dan sasaran anggaran BOS yang dilakukan sekolah. Sesuai data diolah, SMA/SMK negeri dan swasta dalam mengelola dana BOS mulai dari ketepatan anggaran, kecukupan anggaran dan sasaran anggarannya termasuk tinggi. Selain itu, dalam regresi linear berganda bernilai tinggi, maka ketepatan, kecukupan dan sasaran anggaran BOS di SMA/SMK negeri dan swasta di Kota Sukabumi memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pembiayaan sekolah. Hal ini merupakan hal yang baik karena dengan baiknya kinerja pembiayaan sekolah dapat meningkatkan kualitas sekolah tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan diatas, untuk mengoptimalkan ketepatan anggaran kecukupan anggaran dan sasaran anggaran BOS terhadap kinerja pembiayaan sekolah yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas pendidikan harus memperhatikan masalah terkait waktu penyaluran dana BOS yang seringkali terjadi keterlambatan dalam penyalurannya kemudian segera mencari solusinya.
2. Kemendikbud dan dinas pendidikan sesegera mungkin melakukan kajian untuk anggaran BOS di SMA dan SMK agar di lapangan tidak terjadi lagi kekurangan dalam penerimaan dana BOS.
3. Dalam upaya meningkatkan penyaluran dana BOS tiap periodenya agar selalu tepat waktu, diharapkan dinas pendidikan mengontrol dan memantau anggaran BOS agar tidak terjadi ketidaksesuaian dari apa yang sudah direncanakan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian dengan meneliti variable yang lebih terkini contohnya

saja variable pengendalian intern dan pengelolaan anggaran bisa berpengaruh terhadap kinerja pembiayaan sekolah yang bisa dijadikan untuk menambahkan variable x, untuk lebih mengembangkan hasil penelitian ini dan menambahkan variabel sesuai dengan kondisi saat peneliti selanjutnya akan dilakukan serta menambahkan jumlah responden agar hasilnya lebih tergambar jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, A. P., Ilmu, J., Negara, A., Ilmu, F., Dan, S., Maritim, U., & Haji, R. (2013). Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012 (Studi Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kabupaten Bintan). *Naskah Publikasi*, 2012(1).
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, M. (2014). *Memahami Riset Pelaku dan Sosial*. Bandung: Bumi Aksara
- Bastian, I. (2010). *Suatu Pengantar Akuntansi Sektor Publik* (Edisi. Ketiga). Jakarta: Erlangga.
- Husein Umar. 2013. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haryoto.(2008).KinerjaOrganisasi.[Online]Tersedia:<http://lawu96.multiply.com/journal/item/8>. [26 April 2009].
- Indarto, S. L., & Ayu, S. D. (2011). Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Perusahaan Melalui Kecukupan Anggaran, Komitmen Organisasi, Komitmen Tujuan Anggaran, Dan Job Relevant Information (Jri). *Seri Kajian Ilmiah*, 14(1), 32–44.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Edisi Kedua. Jakarta : Erlangga.
- Indriantoro, N. dan Supomo, B. (2011). *Metode penelitian bisnis untuk akuntansi & manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Kualitas, P., Produktif, A., Dan, L., Pada, L. D. R., & Bank, P. (2015). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 2, 295–312.

Kohler, E L. *Auditing. An introduction to the Work Distribution and Operation.*
Penerbit: McGraw-hill

Kenis, I. (1979), “Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes, and Performance”, *Accounting Review*, October, hal. 707- 721
 Locke, E.,Latham (1984). *Goal Setting. A motivational technique that works.*
 Lusthaus, Charles. et. al. (1999). *Enhancing Organizational Performance: A Toolbox for Self-assessment.* Canada: International Development Research Centre.

Prentice Hall. Inc Englewood, New Jersey.

Muhroji. (2012). Anggaran dan pengukuran kinerja sekolah (smu). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 22(1), 50–60.

McPhee SJ. Disorders of the adrenal medulla. Dalam: McPhee SJ, Ganong WF, penyunting. *Pathophysiology of disease an introduction to clinical medicine.* Edisi ke-5. New York: McGraw-Hill;2008.h.327-37

Mulyadi, 2001, *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Mahmudi,(2010) *Manajemen Keuangan Daerah*,Jakarta, Penerbit Erlangga

Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan.* Bandung : PT Refika Aditama

Moh. Mahsun. (2014). *Penilaian Kinerja Sektor Publik.* Edisi ketiga. Yogyakarta: BPF.

Mardiasmo. (2011). *Akuntansi sektor publik.* Yogyakarta: Andi.

Nordiawan, D., & Ayuningtyas Hertianti. (2010). *Akuntansi Sektor Publik.*

Nafarin,M.2013.*Penganggaran Perusahaan.*Jakarta:Salemba Empat.

- Nouri, H. & Parker, R. J. 1998. The Relationship Between Budget Participation and Job Performance: The Roles of Budget Adequacy and Organizational Commitment. *Accounting, Organizations and Society*, 23(5/6), 467-483.
- Haryoto. (2008). Kinerja Organisasi. [Online] Tersedia: <http://lawu96.multiply.com/journal/item/8>. [26 April 2009].
- Nurkolis. (2003). Manajmen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi. Jakarta: Grasindo
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Menteri Keuangan No 93 PMK. 02/2011 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005
- Riduwan dan Sunarto. (2008). *Pengantar statistik untuk penelitian pendidikan, sosial, komunikasi, ekonomi dan bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Riduwan. 2013. Skala Pengukuran Vaiabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta
- Setyawan, A., & Rohman, A. (2013). DAN KECUKUPAN ANGGARAN (Studi Empiris pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Solok). *Ejournal-s1. Undip.ac.id*, 2(1979), 1–12.
- Sekaran, U. (2014). *Research Methods for Business*. Buku 1. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi penelitian untuk bisnis, edisi 4, buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Suharyadi dan Purwanto. (2011). *Statistika untuk ekonomi dan keuangan modern*. Jakarta: Salemba Empat.

Sujarweni, W. (2015). *Metodologi penelitian bisnis & ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru

Sujarweni, W. (2015). *Statistik untuk bisnis & ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sekaran, U. (2006). *Metodologi penelitian untuk bisnis, edisi 4, buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Muhammad Zuhdan 2015. Pendidikan. <http://suaramerdeka.com> . Diakses pada 12 November 2016

Teknis, P. B. O. S. (2015). Sekolah Menengah Atas. *Teknis Bos, 1*, 1–80.

Undang-Undang Tentang Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003

Yuliani, W. (2011). KEDISIPLINAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA. *E-Journal*, (29).

LAMPIRAN

1. Ketepatan Anggaran BOS Keseuaian biaya dengan prosedur

1	Sekolah melakukan belanja kebutuhan yang sesuai dengan petunjuk teknis BOS				
	1	2	3	4	5
	<50% telah sesuai	>50%-70% telah sesuai	>70%-90% telah sesuai	95% telah sesuai	100% sesuai

2	Ketersediaan dana BOS terpenuhi untuk kebutuhan sekolah				
	1	2	3	4	5
	<50% telah terpenuhi	>50%-70% telah terpenuhi	>70%-90% telah terpenuhi	95% telah terpenuhi	100% t terpenuhi

3	Pengambilan dana BOS disaksikan oleh kepala sekolah / komite sekolah				
	1	2	3	4	5
	Tidak pernah di saksikan	Jarang disaksikan	Kadang-kadang disaksikan	Sering disaksikan	Selalu disaksikan

Kelancaran pencairan dana

4	Waktu penyaluran dana BOS sesuai tanggal yang sudah di tetapkan				
	1	2	3	4	5
	Lebih dari 4 minggu dari jadwal	Lebih dari 3 minggu dari jadwal	Lebih dari 2 minggu dari jadwal	Lebih dari 1 minggu dari jadwal	Tepat waktu

5	Mekanisme penyaluran dana BOS sesuai mekanisme yang telah digunakan didalam Juknis				
	1	2	3	4	5
	<50% telah sesuai	>50%-70% telah sesuai	>70%-90% telah sesuai	95% telah sesuai	100% sesuai

6	Guru dan karyawan serta komite sekolah ikut dilibatkan dalam berbagai pengambilan dana				
	1	2	3	4	5
	Tidak pernah dilibatkan	Jarang dilibatkan	Kadang – kadang dilibatkan	Sering dilibatkan	Selalu dilibatkan

**2. Kecukupan Anggaran BOS
Pencapaian hasil yang diinginkan**

7	Tercapainya antara rencana dengan realisasi anggaran di lapangan				
	1	2	3	4	5

	<50% telah tercapai	>50%-70% telah tercapai	>70%-90% telah tercapai	95% telah tercapai	100% tercapai
--	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------------

8	Seberapa menyimpang output yang dihasilkan sekolah dengan yang di rencanakan				
	1	2	3	4	5
	Menyimpang sekalo	Banyak penyimpangan	Kadang-kadang ada penyimpangan	Sedikit ada penyimpangan	Tidak ada penyimpangan

Kecukupan untuk setiap kegiatan operasional

9	Tercukupinya anggaran untuk pengembangan perpustakaan				
	1	2	3	4	5
	<50% telah tercukupi	>50%-70% telah tercukupi	>70%-90% telah tercukupi	95% telah tercukupi	100% tercukupi

10	Tercukupinya anggaran untuk pengadaan penerimaan siswa baru				
	1	2	3	4	5
	<50% telah tercukupi	>50%-70% telah tercukupi	>70%-90% telah tercukupi	95% telah tercukupi	100% tercukupi

11	Tercukupinya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler				
	1	2	3	4	5

	<50% telah tercukupi tercapai	>50%- 70% telah tercukupi	>70%- 90% telah tercukupi	95% telah tercukupi	100% tercukupi
--	---	---	---	--------------------------------	---------------------------

12	Tercukupinya anggaran dan terlaksananya kegiatan ulangan dan ujian sekolah				
	1	2	3	4	5
	<50% telah tercukupi tercapai	>50%- 70% telah tercukupi	>70%- 90% telah tercukupi	95% telah tercukupi	100% tercukupi

13	Tercukupinya anggaran untuk penyediaan bahan-bahan habis pakai				
	1	2	3	4	5
	<50% telah tercukupi tercapai	>50%- 70% telah tercukupi	>70%- 90% telah tercukupi	95% telah tercukupi	100% tercukupi

14	Tercukupinya anggaran untuk penyediaan untuk langganan daya dan jasa				
	1	2	3	4	5
	<50% telah tercukupi tercapai	>50%- 70% telah tercukupi	>70%- 90% telah tercukupi	95% telah tercukupi	100% tercukupi

15	Tercukupinya anggaran untuk peralatan sekolah				
	1	2	3	4	5

	Tidak terawat	Jarang terawat	Kadang-kadang terawat	Sering terawat	Selalu terawat
--	----------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------

16	Tercukupinya anggaran untuk pembayaran GTT/PTT				
	1	2	3	4	5
	Tidak terbayar	Jarang terbayar	Kadang-kadang terbayar	Sering terbayar	Selalu terbayar

17	Tercukupinya anggaran untuk pengadaan dan pengembangan profesi guru				
	1	2	3	4	5
	Tidak tercukupi	Jarang tercukupi	Kadang-kadang tercukupi	Sering tercukupi	tercukupi

18	Tercukupinya anggaran untuk pendanaan dan pembiayaan pengelolaan BOS				
	1	2	3	4	5
	Tidak tercukupi	Jarang tercukupi	Kadang-kadang tercukupi	Sering tercukupi	Tercukupi

**3. Sasaran Anggaran BOS
Penerimaan dana BOS**

19	Sekolah menerima dana BOS tiap Periodenya tepat waktu				
	1	2	3	4	5

	>1 minggu atau sampai 1 bulan	> 6 hari dari jadwal yang telah ditetapkan	>4 hari dari jadwal yang telah ditetapkan	>2 hari dari jadwal yang telah ditetapkan	Tepat waktu
--	---	--	---	---	------------------------

20	Sekolah menerima dana sesuai atau tidak dengan yang telah direncanakan				
	1	2	3	4	5
	<50% telah sesuai	>50%- 70% telah sesuai	>70%- 90% telah sesuai	95% telah sesuai	100% sesuai

21	Sekolah melakukan penerimaan disaksikan oleh kepala sekolah atau komite sekolah				
	1	2	3	4	5
	Tidak pernah disaksikan	Jarang disaksikan	Kadang- kadang disaksikan	Sering disaksikan	Selalu disaksikan

Tujuan dana BOS

2 2	Pengalokasian dana BOS untuk operasional non personalia sekolah yang dialokasikan dari anggaran BOS				
	1	2	3	4	5
	<50% telah dialokasika n	>50%-70% telah dialokasika n	>70%-90% telah dialokasika n	95% telah dialokasika n	100% dialokasika n

23	Anggaran dana BOS membantu untuk mengurangi angka putus sekolah				
	1	2	3	4	5
	<50% telah mengurangi	>50%-70% telah mengurangi	>70%-90% telah mengurangi	95% telah mengurangi	100% mengurangi

24	Penggunaan dana BOS memengaruhi meningkatkan APK siswa				
	1	2	3	4	5
	<50% telah meningkatkan	>50%-70% telah meningkatkan	>70%-90% telah meningkatkan	95% telah meningkatkan	100% meningkatkan

25	Anggaran BOS mewujudkan keberpihakan pemerintah bagi siswa miskin serta membantu tagihan biaya bagi siswa miskin				
	1	2	3	4	5
	<50% telah membantu	>50%-70% telah membantu	>70%-90% telah membantu	95% telah membantu	100% membantu

26	Anggaran BOS memberikan kesempatan setara bagi siswa miskin untuk mendapatkan pendidikan yang telah terjangkau dan bermutu				
	1	2	3	4	5
	<50% telah memberikan	>50%-70% telah memberikan	>70%-90% telah memberikan	95% telah memberikan	100% memberikan

27	Anggaran BOS meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah				
	1	2	3	4	5
	<50% telah meningkatkan	>50%-70% telah meningkatkan	>70%-90% telah meningkatkan	95% telah meningkatkan	100% meningkatkan

28	Terpenuhinya bahan-bahan habis pakai				
	1	2	3	4	5
	<50% telah terpenuhi	>50%-70% telah terpenuhi	>70%-90% telah terpenuhi	95% telah terpenuhi	100% terpenuhi

29	Terpenuhinya langganan daya dan jasa				
	1	2	3	4	5
	<50% telah terpenuhi	>50%-70% telah terpenuhi	>70%-90% telah terpenuhi	95% telah terpenuhi	100% terpenuhi

30	Terawatnya sekolah				
	1	2	3	4	5
	Tidak terawat	Jarang terawat	Kadang-kadang terawat	Sering terawat	Terawat

31	Terpenuhinya anggaran untuk para guru GTT/PTT				
	1	2	3	4	5

	<50% telah terpenuhi	>50%-70% telah terpenuhi	>70%-90% telah terpenuhi	95% telah terpenuhi	100% terpenuhi
--	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------------

32	Menurunnya angka putus sekolah				
	1	2	3	4	5
	<50% telah menurun	>50%-70% telah menurun	>70%-90% telah menurun	95% telah menurun	100% menurun

33	Terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah				
	1	2	3	4	5
	<50% telah terpenuhi	>50%-70% telah terpenuhi	>70%-90% telah terpenuhi	95% telah terpenuhi	100% terpenuhi

Kinerja Pembiayaan Sekolah

Ekonomi

34	Sekolah menggunakan harga terendah dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran				
	1	2	3	4	5
	Tidak sama sekali	Sebagian kecil dilakukan	Sebagian dilakukan	Sebagian besar dilakukan	Seluruh dilakukan

35	Sekolah menggunakan biaya terendah dalam pengadaan barang				
	1	2	3	4	5

	Tidak sama sekali	Sebagian kecil dilakukan	Sebagian dilakukan	Sebagian besar dilakukan	Seluruhnya dilakukan
--	--------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------

36	Melaksanakan pengadaan barang atau jasa dengan kualitas terbaik				
	1	2	3	4	5
	Tidak sama sekali	Sebagian kecil dilakukan	Sebagian dilakukan	Sebagian besar dilakukan	Seluruh dilakukan

37	Sekolah melaksanakan program berturut-turut dengan biaya di tahun ke-2 lebih kecil dari tahun sebelumnya				
	1	2	3	4	5
	<50% telah dilaksanakan	>50%-70% telah dilaksanakan	>70%-90% telah dilaksanakan	95% telah dilaksanakan	100% dilaksanakan

Efisiensi

38	Sekolah memilih strategi yang memerlukan biaya terendah untuk mencapai tujuan sekolah				
	1	2	3	4	5
	Tidak sama sekali	Sebagian kecil memilih	Sebagian memilih	Sebagian besar memilih	Seluruh memilih

39	Melakukan pengurangan aktivitas yang tidak menambah nilai bagi kesejahteraan sekolah				
-----------	---	--	--	--	--

	1	2	3	4	5
	<50% telah melakukan	>50%-70% telah melakukan	>70%-90% telah melakukan	95% telah melakukan	100% melakukan

40	Pengalihan aktivitas dan fungsi yang tidak menambah nilai bagi kesejahteraan sekolah dan justru membebani anggaran				
	1	2	3	4	5
	Tidak sama sekali	Sebagian kecil dialihkan	Sebagian dialihkan	Sebagian besar dialihkan	Seluruh dialihkan

Efektivitas

41	Kinerja dan program yang dibuat selalu mengacu pada visi dan misi organisasi				
	1	2	3	4	5
	<50% telah mengacu	>50%-70% telah mengacu	>70%-90% telah mengacu	95% telah mengacu	100% mengacu

42	Sekolah menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya				
	1	2	3	4	5

	<50% telah menghasilkan	>50%-70% telah menghasilkan	>70%-90% telah menghasilkan	95% telah menghasilkan	100% menghasilkan
--	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------

43	Sekolah berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat				
	1	2	3	4	5
	<50% telah berupaya	>50%-70% telah berupaya	>70%-90% telah berupaya	95% telah berupaya	100% berupaya